



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT



PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019



PADANG, TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan perkenannya, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, pada pasal 4 mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini diterbitkan untuk memenuhi amanat tersebut sekaligus memberikan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini adalah data kependudukan hasil konsolidasi dan pembersihan data yang dilakukan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia per 31 Desember 2019, data perkembangan kependudukan Kabupaten/Kota, dan data pendukung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi teknis terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran, serta untuk evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dan penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta penduduk harus dijadikan subjek dan

objek dalam pembangunan. Dengan kata lain pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Disisi lain, pembangunan juga harus semakin menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping pembangunan infrastruktur.

Disadari bahwa penyajian data dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, tanggapan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan penyajian Profil Perkembangan Kependudukan dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini diucapkan terima kasih. Semoga Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 23 Oktober 2020
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat



IRWAN, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda/NIP.19680415 198902 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penyusunan	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian	3
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	
A. Letak Geografis Daerah	11
B. Kondisi Demografis Daerah	14
C. Gambaran Ekonomi Daerah	18
D. Potensi Daerah	22
 BAB III SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN	
A. Sumber Data	28
B. Komponen Kependudukan	29
1. Kuantitas Penduduk	29
a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	30
1) Jumlah Penduduk	32
2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	34
a) Umur Median (<i>Median Age</i>)	36
b) Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	38
c) Piramida Penduduk	41
d) Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	44
3) Rasio Kepadatan Penduduk (<i>Population Density Ratio</i>)	46
4) Angka Pertumbuhan	

Penduduk	48
b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	50
1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	50
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	53
3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	57
4) Penduduk Menurut Status Kawin	61
a) Angka Perkawinan Kasar	64
b) Angka Perkawinan Umum	65
c) Angka Perceraian Kasar (<i>Divorce</i>)	67
d) Angka Perceraian Umum	68
c. Keluarga	70
1) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	71
2) Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)	72
3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	74
4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	75
5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	77
6) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan	80
7) Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja	82
d. Kelahiran (Fertilitas)	84
1) Jumlah Kelahiran	84
2) Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate/CBR</i>)	86
3) Angka Kematian Kasar (<i>Crude Death Rate/CDR</i>)	87
2. Kualitas Penduduk	89
a. Kesehatan	89
1) Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child women Ratio/CWR</i>)	89
2) Kematian (Mortalitas)	90

a) Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate/</i> <i>IMR/AKB</i>)		91
b) Angka Kematian Neonatal (<i>Neo-Natal Death</i> <i>Rate/NNDR</i>)		93
c) Angka Kematian Post Neo- Natal (<i>Post Neo-Natal Death</i> <i>Rate/PNNDR</i>)		94
d) Angka Kematian Anak		95
e) Angka Kematian Balita		97
f) Angka Kematian Ibu (<i>Maternity Mortality</i> <i>Rate/AKI</i>)		98
b. Pendidikan		100
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)		100
2) Angka Partisipasi Murni (APM)		102
3) Angka Putus Sekolah (APS)		104
c. Ekonomi		105
1) Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja		106
a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja		106
b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)		107
2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)		108
3) Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan		110
4) Pengangguran Terbuka		113
d. Sosial		114
1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		114
2) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat		117
3. Mobilitas Penduduk		120
a. Angka Migrasi Masuk (<i>in-</i>		

	<i>migration/Mi)</i>	120
b.	Angka Migrasi Keluar (<i>out-migration/Mo)</i>	122
c.	Angka Migrasi Neto (<i>nett-migration/Mn)</i>	124
d.	Transmigrasi	125
4.	Kepemilikan Dokumen	
	Kependudukan	126
a.	Kepemilikan Kartu Keluarga	126
b.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	127
c.	Kepemilikan Akta	129
	1) Kepemilikan Akta Kelahiran	129
	2) Kepemilikan Akta Perkawinan	132
	3) Kepemilikan Akta Perceraian	133
	4) Kepemilikan Akta Kematian	135
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	137
	B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019	15
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	17
Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2019	33
Tabel 4. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2019	35
Tabel 5. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	37
Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	40
Tabel 7. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	41
Tabel 8. Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	45
Tabel 9. Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	47
Tabel 10. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	49
Tabel 11. Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	52
Tabel 12. Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	55
Tabel 13. Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2018	56
Tabel 14. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	57

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	60
Tabel 16. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	61
Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	62
Tabel 18. Angka Perkawinan Kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	65
Tabel 19. Angka Perkawinan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	66
Tabel 20. Angka Perceraian Kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	68
Tabel 21. Angka Perceraian Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	69
Tabel 22. Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	72
Tabel 23. Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	73
Tabel 24. Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	75
Tabel 25. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	76
Tabel 26. Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	78
Tabel 27. Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	81
Tabel 28. Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019	82
Tabel 29. Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	85
Tabel 30. Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate/CDR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	87
Tabel 31. Angka Kematian Kasar (<i>Crude Death Rate/CDR</i>)	

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		88
Tabel 32. Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ratio/CWR</i>) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		89
Tabel 33. Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		92
Tabel 34. Angka Kematian Neonatal (<i>Neo-Natal Death Rate/NNDR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		93
Tabel 35. Angka Kematian Post Neo-Natal (<i>Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		95
Tabel 36. Angka Kematian Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		96
Tabel 37. Angka Kematian Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		97
Tabel 38. Angka Kematian Ibu (<i>Maternity Mortality Rate/MMR</i>) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		99
Tabel 39. Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		100
Tabel 40. Angka Partisipasi Kasar (APK)/ <i>Gross Enrollment Ratio (GER)</i> Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		101
Tabel 41. Angka Partisipasi Murni (APM)/ <i>Net Enrollment Ratio (NER)</i> Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		103
Tabel 42. Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		104
Tabel 43. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		107
Tabel 44. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		108
Tabel 45. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		109
Tabel 46. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		112
Tabel 47. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		113
Tabel 48. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		116
Tabel 49. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin		

Sumatera Barat Tahun 2019		117
Tabel 50. Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		118
Tabel 51. Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		119
Tabel 52. Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		121
Tabel 53. Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		123
Tabel 54. Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		125
Tabel 55. Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		127
Tabel 56. Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		128
Tabel 57. Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		130
Tabel 58. Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		131
Tabel 59. Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		132
Tabel 60. Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019		134
Tabel 61. Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		135

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		18
Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019		42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, energi, meningkatnya kebutuhan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, meningkatnya persaingan lapangan kerja, semakin sempitnya lapangan dan peluang kerja, meningkatnya pengangguran khususnya bagi mereka yang tidak mampu bersaing.

Untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut sudah barang tentu diperlukan data kependudukan yang benar, valid, dan akurat. Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui informasi kependudukan seperti jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk serta persebarannya.

Tersedianya data kependudukan yang baik, dalam arti mampu mengobservasikan peristiwa-peristiwa vital, kelahiran, kematian, dan perpindahan dirasakan semakin penting dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Data dan informasi mengenai kependudukan yang sudah cukup lama dan tersebar di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan sudah banyak dikembangkan untuk berbagai kebutuhan. Apabila data dan informasi yang ada tersebut berhasil diintegrasikan secara menyeluruh,

niscaya akan menjadi aset sekaligus informasi yang berarti untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Komposisi data penduduk yang senantiasa berubah, wajib dimutakhirkan dan divalidasi secara berkelanjutan melalui mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota, dimana saat ini telah terbangun dalam suatu SIAK dan telah terintegrasi dengan database e-KTP yang telah menjamin ketunggalan data dengan merekam data biometric penduduk seperti iris mata dan sidik jari sehingga keakuratan dan kevalidan data semakin tinggi.

Dengan demikian, upaya pengembangan sebuah sistem administrasi kependudukan memang merupakan suatu keharusan karena akan mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan tersedianya database kependudukan, khususnya yang bersumber pada SIAK.

Sejalan dengan itu guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa data kependudukan harus digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan disusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan memberikan data dan informasi yang berguna untuk proses lebih lanjut dalam perencanaan, alokasi anggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan di Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah :

1. Memberikan informasi dan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai alat publikasi dan meningkatkan pelayanan publik guna membangun komitmen semua pihak untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi penduduk dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

C. RUANG LINGKUP

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. Mobilitas penduduk
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. PENGERTIAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan.
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. **Administrasi kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

4. **Data** adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam berbagai bentuk media.
5. **Database** kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
6. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
8. **Profil perkembangan kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
9. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. **Kuantitas penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
12. **Mobilitas penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah Kabupaten/Kota.
13. **Persebaran penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

14. **Struktur penduduk** adalah pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, status hubungan dalam keluarga, status perkawinan dan lapangan pekerjaan.
15. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin.
16. **Umur median** adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median.
17. **Rasio Jenis Kelamin (RJK)** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per seratus penduduk perempuan.
18. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik.
19. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.
20. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu.

21. **Pertumbuhan penduduk** adalah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu, dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai “per waktu unit” untuk pengukuran.
22. **Angka pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persentase (%).
23. **Angka perkawinan kasar** menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.
24. **Angka perkawinan umum (AKU)** menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu.
25. **Angka perceraian kasar (*divorce*)** menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.
26. **Angka perceraian umum** menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.
27. **Keluarga** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.
28. **Kelahiran (*fertilitas*)** merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*) atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan.
29. **Jumlah kelahiran** didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

30. **Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)** menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
31. **Lahir hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
32. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
33. **Kematian (*mortalitas*)** adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan.
34. **Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*)** merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk.
35. **Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)** adalah rasio antara jumlah anak dibawah 5 tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
36. **Kematian bayi (*infant mortality*)** adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun.
37. **Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR/AKB*)** adalah jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.
38. **Kematian bayi endogen atau kematian neonatal** adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang

diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

39. **Angka kematian neonatal (*Neo-Natal Death Rate/NNDR*)** adalah jumlah kematian neo-natal per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
40. **Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal** adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar.
41. **Angka kematian post neo-natal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)** adalah jumlah kematian post neo-natal per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.
42. **Kematian anak** adalah kematian yang terjadi pada penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari yang dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.
43. **Angka kematian anak** adalah jumlah kematian anak selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
44. **Kematian balita** adalah kematian yang terjadi pada semua anak termasuk bayi yang baru lahir yang berumur 0 tahun sampai dengan menjelang 5 tahun, umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.
45. **Angka kematian balita** adalah jumlah kematian balita selama satu tahun tertentu per 1.000 balita umur yang sama pada pertengahan tahun itu.
46. **Kematian ibu** adalah kematian yang terjadi pada perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan yang disebabkan karena

factor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

47. **Angka kematian ibu** adalah banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
48. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
49. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
50. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
51. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
52. **Angka putus sekolah (APS)** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan.
53. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih.
54. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
55. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan

tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

56. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
57. **Angka partisipasi angkatan kerja (APAK)** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
58. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
59. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
60. **Pengangguran terbuka** merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
61. **Migrasi penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.
62. **Angka migrasi masuk (*in-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun.
63. **Angka migrasi keluar (*out-migration*)** adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.
64. **Angka migrasi neto (*net-migration*)** adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar.
65. **Migrasi neto positif** adalah apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar.

66. **Migrasi neto negatif** adalah apabila migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk.
67. **Transmigrasi** adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada 0°54' LU - 3°30'LS dan 98°36' BT - 101°53'BT dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau.
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.012,89 kilometer persegi. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17 persen merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420,357 kilometer dengan luas perairan laut 186.580 kilometer persegi. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Gunung tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada

jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Beberapa gempa bumi besar terakhir yang terjadi di Sumatera Barat diantaranya adalah gempa bumi 30 September 2009 dan gempa bumi Kepulauan Mentawai Tahun 2010.

Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 928 Desa, dan 230 Kelurahan. Kesembilan belas Kabupaten/Kota itu adalah :

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Desa.
- 2) Kabupaten Solok terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Desa.
- 3) Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 Kecamatan dan 61 Desa.
- 4) Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Desa.
- 5) Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan dan 103 Desa.
- 6) Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan dan 82 Desa.
- 7) Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan dan 79 Desa.
- 8) Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 37 Desa.
- 9) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan dan 43 Desa.
- 10) Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan 52 Desa.
- 11) Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 39 Desa.
- 12) Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Desa.
- 13) Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.
- 14) Kota Solok terdiri dari 2 Kecamatan dan 13 Kelurahan.

- 15) Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 27 Desa, dan 10 Kelurahan.
- 16) Kota Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan.
- 17) Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan.
- 18) Kota Payakumbuh terdiri dari 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan.
- 19) Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan, 55 Desa, dan 16 Kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten/Kota terbesar dengan luas wilayah 6.011,35 kilometer persegi atau 14,31 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan Kabupaten/Kota terkecil dengan luas wilayah 23 kilometer persegi atau 0,05 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 5.551.758 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.793.295 jiwa (50,31 persen) dan perempuan sebanyak 2.758.463 jiwa (49,69 persen). Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat di hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	257.913	253.812	511.725
2	Kabupaten Solok	194.661	193.207	387.868
3	Kabupaten Sijunjung	121.180	117.867	239.047
4	Kabupaten Tanah Datar	186.730	186.180	372.910
5	Kabupaten Padang Pariaman	214.735	216.489	431.224
6	Kabupaten Agam	267.277	263.259	530.536
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	190.785	192.147	382.932
8	Kabupaten Pasaman	156.812	154.630	311.442
9	Kabupaten Kep. Mentawai	46.142	42.703	88.845
10	Kabupaten Dharmasraya	109.309	106.032	215.341
11	Kabupaten Solok Selatan	92.845	89.272	182.117
12	Kabupaten Pasaman Barat	219.843	213.918	433.761
13	Kota Padang	455.549	453.008	908.557
14	Kota Solok	37.383	36.888	74.271
15	Kota Sawahlunto	33.638	33.215	66.853
16	Kota Padang Panjang	29.248	28.892	58.140
17	Kota Bukittinggi	61.802	61.494	123.296
18	Kota Payakumbuh	70.048	69.071	139.119
19	Kota Pariaman	47.395	46.379	93.774
	Sumatera Barat	2.793.295	2.758.463	5.551.758

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat untuk periode Semester I – Semester II Tahun 2019 adalah sebesar 0,16 persen. Dari 19 Kabupaten/Kota terdapat 1 (satu) Kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan minus sebesar -2,41 persen yaitu Kabupaten Pasaman. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pasaman telah mengajukan permohonan pembersihan data penduduk non aktif sebanyak 9.578 data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui surat resmi Kepala Dinas pada tanggal 6 Desember 2019. Data penduduk non aktif yang ditemukan

tersebut merupakan hasil pelayanan perekaman KTP elektronik door to door dan verifikasi langsung data wajib KTP-el yang belum melaksanakan perekaman dan hasil penyandingan data antar Kecamatan dalam Kabupaten.

Penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda-beda menyebabkan jumlah penduduk disetiap Kabupaten/Kota sangatlah bervariasi dengan tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 132,14 jiwa per kilometer persegi.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu 4.884,94 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah yang hanya 25,24 kilometer persegi dan merupakan wilayah dengan luas terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari keberadaan dan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Bukittinggi.

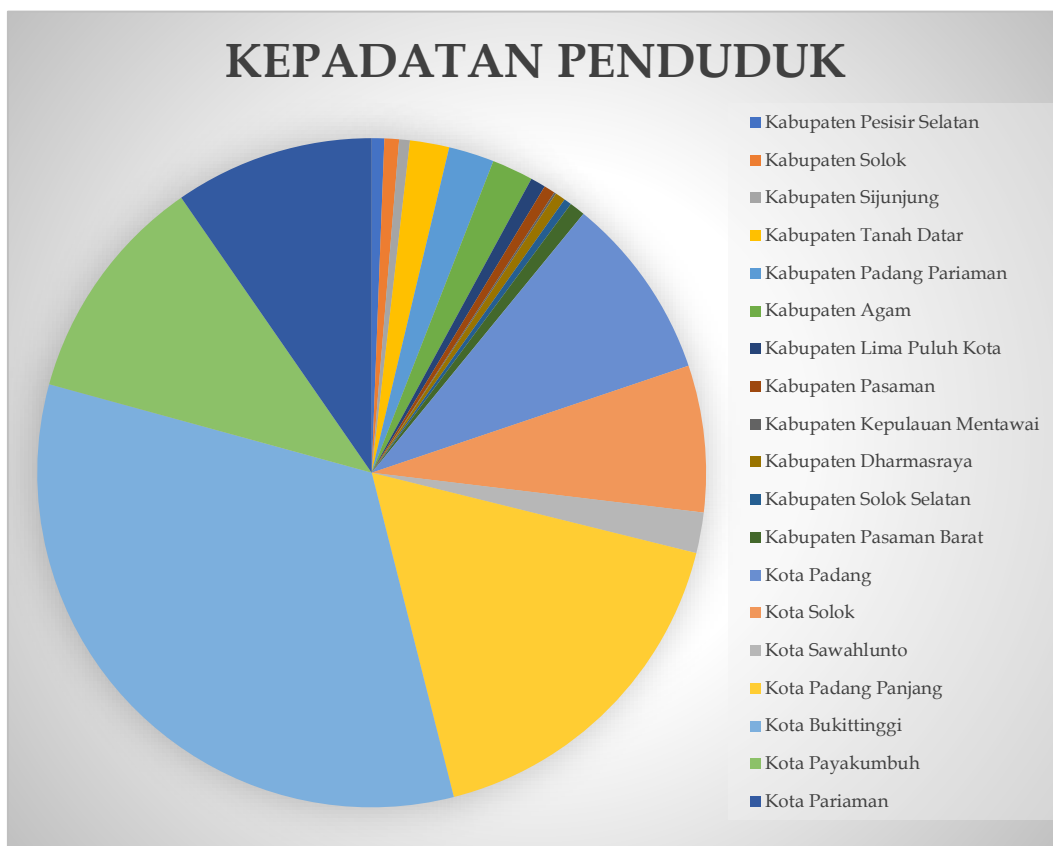
Sementara itu, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya 14,78 jiwa per kilometer persegi dengan luas wilayah terbesar yaitu 6.011,35 kilometer persegi. Ini disebabkan karena Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Kabupaten yang bentuk wilayah geografisnya adalah kepulauan, dimana terdiri dari 4 (empat) pulau besar yang berpenghuni yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan yang dihuni oleh mayoritas suku Mentawai dan 95 (sembilan puluh lima) pulau-pulau kecil lainnya yang menyebar disekeliling Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun, sebagian besar pulau yang lain hanya ditanami dengan pohon kelapa dan jarak rumah penduduk yang jauh antara satu sama lainnya.

Gambaran jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	511.725	5.749,89	89,00
2	Kabupaten Solok	387.868	3.738,00	103,76
3	Kabupaten Sijunjung	239.047	3.130,40	76,36
4	Kabupaten Tanah Datar	372.910	1.336,10	279,10
5	Kabupaten Padang Pariaman	431.224	1.332,51	323,62
6	Kabupaten Agam	530.536	1.804,30	294,04
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	382.932	3.571,14	107,23
8	Kabupaten Pasaman	311.442	3.947,63	78,89
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.845	6.011,35	14,78
10	Kabupaten Dharmasraya	215.341	2.961,13	72,72
11	Kabupaten Solok Selatan	182.117	3.346,20	54,43
12	Kabupaten Pasaman Barat	433.761	3.887,77	111,57
13	Kota Padang	908.557	693,66	1.309,80
14	Kota Solok	74.271	71,29	1.041,82
15	Kota Sawahlunto	66.853	231,93	288,25
16	Kota Padang Panjang	58.140	23,00	2.527,83
17	Kota Bukittinggi	123.296	25,24	4.884,94
18	Kota Payakumbuh	139.119	85,22	1.632,47
19	Kota Pariaman	93.774	66,13	1.418,03
	Sumatera Barat	5.551.758	42.012,89	132,14

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 dan BPS (diolah)



Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Sedangkan berdasarkan agama, penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 5.419.972 jiwa atau 97,63 persen dan pemeluk agama lainnya adalah Kristen sebanyak 81.445 jiwa atau 1,47 persen, Katholik sebanyak 46.358 jiwa atau 0,84 persen Hindu sebanyak 91 jiwa atau 0 persen, Budha sebanyak 3.612 jiwa atau 0,07 persen, Konghucu sebanyak 4 jiwa atau 0 persen, dan Kepercayaan sebanyak 276 jiwa atau 0 persen.

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Pada triwulan IV 2019, ekonomi Sumatera Barat tumbuh moderat pada level 5,13% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan III 2019 sebesar 5,17% (yoy) dan triwulan IV 2018 yang mencapai 5,51% (yoy).

Berdasarkan lapangan usaha (LU), terbatasnya pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan pada tiga sektor penopang utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar-eceran serta sektor transportasi dan pergudangan. Meskipun terjadi perlambatan pada sektor penopang utama, perekonomian Sumatera Barat masih didorong oleh akselerasi pertumbuhan pada sektor jasa keuangan, sektor jasa pendidikan dan sektor konstruksi. Berdasarkan pengeluaran, perekonomian didorong oleh pertumbuhan pada komponen Net Ekspor Antar Daerah, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Ketiga komponen tersebut mengalami peningkatan tertinggi. Selain itu, kinerja ekspor terpantau membaik meskipun masih mengalami penurunan, sedangkan impor kembali mengalami penurunan tajam.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat diperkirakan masih akan tertahan di triwulan I 2020. Tertahannya kinerja perekonomian di awal tahun 2020 terutama disebabkan oleh prakiraan penurunan kinerja industri pengolahan serta melambatnya pertumbuhan pada sektor perdagangan besar-eceran dan sektor konstruksi. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor pertanian sebagai penopang utama diperkirakan akan mengalami ekspansi. Pertumbuhan juga didukung oleh indikasi penurunan harga tiket angkutan udara di awal tahun 2020 yang diharapkan dapat kembali meningkatkan sektor transportasi dan pergudangan. Di sisi lain, kinerja konsumsi rumah tangga dan PMTB di awal tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan seiring masih terbatasnya aktivitas swasta di awal tahun.

Realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat hingga triwulan IV 2019 meningkat, sedangkan realisasi pendapatan menurun dibandingkan realisasi triwulan IV 2018. Sementara, persentase realisasi belanja maupun

pendapatan 19 Pemkab/Kota di Sumatera Barat hingga triwulan IV 2019 meningkat dibandingkan triwulan IV 2018. Realisasi belanja secara agregat mencapai 89,56% dengan nilai Rp20,78 triliun. Realisasi pendapatan pada triwulan IV 2019 tercatat sebesar 94,24% atau senilai Rp20,9 triliun. Daya serap belanja APBN untuk kementerian/lembaga di Provinsi Sumatera Barat hingga triwulan IV 2019 sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan IV 2018 mencapai 92,28% atau senilai Rp15,42 triliun.

Tekanan inflasi pada tahun 2019 melambat. Perlambatan tekanan inflasi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,60% (yoy). Melambatnya laju inflasi pada triwulan tersebut disebabkan oleh melandainya tingkat inflasi kelompok bahan makanan, terutama disebabkan oleh deflasi pada komoditas cabai merah dan beras. Sementara itu, tarif rekreasi menjadi penyumbang inflasi terbesar secara tahunan. Ke depan, inflasi Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I 2020 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2019. Semakin solidnya koordinasi TPID Provinsi maupun level Kabupaten/Kota dalam pengendalian tingkat inflasi diharapkan juga dapat menjaga laju inflasi dalam rentang yang rendah dan stabil.

Stabilitas keuangan daerah di Sumatera Barat pada triwulan IV 2019 masih terjaga. Aset Perbankan di Sumatera Barat pada triwulan IV 2019 tumbuh sebesar 4,21% (yoy) atau sebesar Rp68,39 triliun, melambat dibandingkan triwulan III 2019 yang tumbuh 5,01% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumatera Barat tumbuh 7,30% (yoy) dengan nilai Rp49,39 triliun, meningkat dibandingkan triwulan III 2019 sebesar 3,85% (yoy). Kredit/pembiayaan di Sumatera Barat pada triwulan IV 2019 tercatat tumbuh 4,81% (yoy) senilai Rp57,77 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 yang tumbuh 5,19% (yoy). Di sisi lain, rasio

Non-Performing Loan (NPL) Sumatera Barat tercatat stabil pada angka 2,60% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2019 sebesar 3,01% (yoy) seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, dan adanya perbaikan harga komoditas.

Transaksi non tunai di Sumbar terus menunjukkan tren positif. Transaksi non tunai di Sumbar mengalami peningkatan signifikan. Pada triwulan I,II dan III 2019, transaksi instrumen uang elektronik dan transaksi yang dilakukan di kanal pembayaran Layanan Keuangan Digital tumbuh, tetapi pada triwulan IV, mengalami penurunan pesat.

Dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir, penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Meskipun demikian, mayoritas penduduk miskin masih berada di perdesaan. Selain itu, laju pertumbuhan garis kemiskinan di Sumatera Barat pada September 2019 mengalami kenaikan dari periode September 2018. Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan IV 2019. Peningkatan NTP tersebut terutama berasal dari NTP subsektor hortikultura, subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan rakyat.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8% - 5,2% (yoy), meningkat dari prakiraan triwulan sebelumnya sebesar 4,6% - 5,0% (yoy). Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 terutama didorong peningkatan permintaan pada periode Idul Fitri yang jatuh di bulan Mei 2020. Komponen konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang perekonomian Sumatera Barat di triwulan II 2020. Kinerja ekspor diperkirakan membaik namun masih terbatas dan tumbuh negatif sejalan dengan masih turunnya pertumbuhan industri pengolahan. Secara sektoral, pertumbuhan akan didorong oleh sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor informasi dan komunikasi.

Secara agregat, inflasi Sumbar tahun 2020 diperkirakan akan berada di pada kisaran 2,4% - 2,8% (yoy). Kondisi ini diperkirakan disebabkan oleh penyesuaian tarif cukai rokok, serta terganggunya pasokan akibat cuaca dan COVID-19. Lebih lanjut, laju inflasi di triwulan II 2020 diperkirakan berada pada rentang 2,1% - 2,5% (yoy) atau relatif meningkat dibandingkan triwulan IV 2019. Peningkatan permintaan saat HBKN Idul Fitri diperkirakan akan mendorong inflasi pada triwulan II 2020.

D. POTENSI DAERAH

Sumatera Barat, salah satu provinsi di Indonesia di wilayah Pulau Sumatera, dilengkapi dengan keanekaragaman hayati. Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh laut dan juga barisan pegunungan, maka mengakibatkan daerah Sumatera Barat dikelilingi oleh hutan hujan tropis, dengan kondisi curah hujan dan kelembaban yang mendukung bagi berbagai jenis tanaman tropis. Oleh karena itu, hampir 70 persen wilayah hutan di Sumatera Barat dijadikan hutan konservasi (32 persen) dan hutan lindung (35 persen). Dukungan Geografi tersebut membuat sektor pertanian menjadi unggulan di Sumatera Barat dari sembilan jenis sektor usaha lainnya.

Tidak hanya hutan, Sumatera Barat juga terkenal dengan bentangan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan terbentang dari utara Pulau Sumatera yaitu Nangroe Aceh Darusalam sampai ujung selatan yaitu Lampung, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci yang terbentang di Jambi. Rangkaian Pegunungan Bukit Barisan merupakan rangkaian perunungan pertemuan dari pelat tektonik Euroasia dan Australia. Pelat Tektonik tersebut mengandung banyak mineral dan bebatuan. Kondisi geografis alam tersebut memberikan implikasi adanya keanekaragaman batuan yang mungkin mendukung kapasitas produksi daerah. Terkhusus

di Sumatera Barat, yang terkenal adalah Pasaman Area, masih dalam eksplorasi diperkirakan memiliki potensi tambang emas.

Sumber daya alam yang ada di Sumatra Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan.

Sumatra Barat memiliki potensi bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A, yaitu batu bara terdapat di kota Sawahlunto. Sedangkan Bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten dan kota, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil.

Bahan galian juga banyak terdapat di daerah ini. Salah satu yang telah banyak memberi manfaat bagi daerah ini adalah batuan kapur sebagai bahan dasar industri semen. PT Semen Padang telah memanfaatkan kekayaan alam ini selama puluhan tahun. Batu kapur banyak terdapat di sekitar Padang, daerah sekitar Danau Singkarak, dan Padangpanjang. Di Padang Panjang, deposit batu kapur yang dapat dieksploitasi mencapai 43 juta ton. Bahan galian lainnya adalah batu bara di Sawahlunto serta obsidian dan batu andesit di Padangpariaman. Sumber air yang melimpah juga telah banyak memberi manfaat bagi pembangunan daerah ini. Perairan danau Singkarak dan Maninjau telah lama dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sumber air ini juga memiliki potensi besar untuk diolah dan dikemas menjadi air mineral.

Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Di daerah perbukitan dan pegunungan terdapat perkebunan karet, cengkih, dan lada. Kawasan pegunungan yang ditutupi hutan menghasilkan kayu. Medan yang berat karena banyaknya lereng perbukitan yang curam merupakan tantangan utama pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini.

Keindahan alam dan budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat sudah terkenal dan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Umumnya tiap Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai obyek pariwisata minimal satu kategori yang potensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata alam dan budaya.

Kategori dari obyek pariwisata ini dapat berupa obyek pemandangan alam dari pantai seperti Teluk Bayur, wilayah pegunungan yang sangat mempesona, danau, ngarai dan lembah atau obyek kebudayaan.

Sumatra Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival dan even internasional, menjadi pendorong datangnya wisatawan ke provinsi ini. Beberapa kegiatan internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatra Barat adalah lomba balap sepeda *Tour de Singkarak*, even paralayang *Event Fly for Fun in Lake Maninjau*, serta kejuaraan selancar *Mentawai International Pro Surf Competition*.

Sumatra Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu pariwisata

Sumatra Barat juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Tabuik, Festival Rendang, permainan kim, dan seni bertenun. Disamping wisata alam dan budaya, Sumatra Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya.

Sumatra Barat memiliki akomodasi wisata, seperti hotel dan agen perjalanan yang cukup baik. Sedangkan untuk agen perjalanan di bawah keanggotaan ASITA, Sumatra Barat sudah memiliki lebih dari 100 agen. Untuk melengkapi fasilitas penunjang pariwisata, pemerintah juga menyediakan kereta api wisata yang beroperasi pada waktu tertentu.

Untuk berbagai informasi serta literatur sejarah dan kebudayaan Minangkabau, wisatawan dapat memperolehnya di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang terletak di Perkampungan Minangkabau, Padang Panjang. Di PDIKM terdapat berbagai dokumentasi berupa foto mikrograf, surat kabar, pakaian tradisional, kaset rekaman lagu daerah, dokumentasi surat-surat pemerintahan, dan alur sejarah masyarakat Minangkabau sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-an.

Tujuan wisata budaya di Sumatera Barat mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan, dimana kekayaan budaya Minangkabau seperti rumah gadang maupun kebudayaan suku Mentawai termasuk salah satu yang unik di nusantara dan dapat menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Di sektor pariwisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di Sumatera Barat telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu DPN Mentawai Mentawai-Siberut dan Sekitarnya dan DPN Padang-Bukittinggi dan

Sekitarnya. Dari 2 DPN tersebut telah ditetapkan 10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu :

1. KPPN Siberut dan sekitarnya.
2. KPPN Sipora dan sekitarnya.
3. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya.
4. KPPN Padang dan sekitarnya.
5. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya.
6. KPPN Singkarak dan sekitarnya.
7. KPPN Batusangkar dan sekitarnya.
8. KPPN Maninjau dan sekitarnya.
9. KPPN Sawahlunto dan sekitarnya.
10. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya.

Dengan telah ditetapkannya secara normatif potensi yang dimiliki Sumatera Barat di bidang kepariwisataan oleh Pemerintah Pusat, maka kedepan arah pengembangan kepariwisataan oleh Pemerintah Daerah akan semakin jelas. Kekhasan wilayah geografi dan bentuk topografi, mulai dari daerah pesisir pantai, pulau-pulau, sampai dengan daerah dataran tinggi, pegunungan, danau dan sungai menjadi potensi pengembangan pariwisata Sumatera Barat.

Keunikan wilayah Sumatera Barat didukung pula oleh iklim tropis sebagai daerah perlintasan garis khatulistiwa. Keindahan alami hutan tropis dan keelokan pemandangan jajaran perbukitan, sawah dan ladang di sepanjang jalan yang menghubungkan antar daerah dan wilayah Sumatera Barat telah didukung dengan sarana prasarana jalan dan transportasi yang memadai, menjadi bagian dari potensi pengembangan pariwisata.

Penduduk Sumatera Barat yang ramah, religius dan terbuka menganut nilai-nilai matriakat yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya di Indonesia yang menganut sistim patriakat. Keunikan lokal

seperti ini dan hal lainnya yang terkait budaya, kesenian, kearifan lokal, kuliner dan peran sejarah dalam kemerdekaan RI telah memperkaya potensi wisata Sumatera Barat. Dengan beragamnya objek dan tujuan wisata yang dapat dikunjungi serta dinikmati di Sumatera Barat, maka pariwisata berpotensi sebagai lokomotif dalam percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bulan Desember 2019 mencapai 5.180 orang, mengalami kenaikan 3,33 persen dibanding wisman November 2019 yang tercatat sebanyak 5.013.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2019 mencapai rata-rata 60,18 persen; mengalami penurunan 2,09 poin dibanding TPK bulan November 2019 sebesar 62,27 persen.

Jumlah barang yang diangkut melalui angkutan laut dalam negeri Sumatera Barat pada bulan Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

BAB III

SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

A. SUMBER DATA

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota.

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan database e-KTP dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk posisi per 31 Desember 2019 dan data yang berasal dari OPD dan Instansi teknis (lintas sektor) terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk

mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN

1. Kuantitas Penduduk

Komposisi dan Persebaran Penduduk

Bagian ini menjelaskan mengenai komposisi dan persebaran (distribusi) penduduk dilihat dari berbagai aspek atau karakteristik.

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi, dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya.

Pengelompokan ini sangat berguna untuk :

- Mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya.
- Mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan.
- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan.
- Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya.
- Mengetahui “proses demografi” yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk.

Komposisi penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dapat diklasifikasikan menurut :

- Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak.
- Karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan.

- Karakteristik ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan.
- Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, kecamatan, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persebaran penduduk (distribusi penduduk) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- Persebaran penduduk secara geografis.
- Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan.

a. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Karakteristik penduduk sangat berpengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin. Distribusi penduduk menurut umur dikelompokkan menurut umur satu tahunan atau umur tunggal (*single age*) dan lima tahunan, namun dapat juga dikelompokkan menurut distribusi umur tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pengelompokan penduduk menurut usia sekolah (SD = 7-12 tahun; SLTP = 13-15 tahun; SLTA = 16-18 tahun; dan Perguruan Tinggi = 19-24 tahun). Selain pengelompokan berdasarkan distribusi umur penduduk, terdapat juga pengelompokan penduduk berdasarkan struktur

umur penduduk yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :

- Penduduk usia muda, yaitu penduduk usia dibawah 15 tahun atau kelompok umur 0-14 tahun.
- Penduduk usia produktif, yaitu penduduk umur 15-64 tahun.
- Penduduk usia lanjut, yaitu penduduk umur 65 tahun keatas (mengikuti ketentuan WHO).

Struktur penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk kelompok umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila jumlah penduduk yang berumur dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih.

Suatu daerah yang mempunyai karakteristik penduduk muda membutuhkan investasi sosial ekonomi yang berbeda dengan investasi untuk kelompok penduduk tua. Kelompok penduduk muda membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sandang dan lain sebagainya. Sementara kelompok penduduk tua tidak membutuhkan fasilitas pendidikan, tetapi fasilitas untuk ketenagakerjaan, kesehatan, kebutuhan sosial lainnya dan lain sebagainya.

Indikator yang menunjukkan komposisi penduduk menurut karakteristik demografi adalah :

- Umur median (*median age*)
- Rasio jenis kelamin (*sex ratio*)
- Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*)

1) *Jumlah Penduduk*

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (masuk/*immigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (*net migration*).

Namun, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Wilayah
Dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2019

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Total	%
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	257.913	9,23	253.812	9,20	511.725	9,22
1302	Kabupaten Solok	194.661	6,97	193.207	7,00	387.868	6,99
1303	Kabupaten Sijunjung	121.180	4,34	117.867	4,27	239.047	4,31
1304	Kabupaten Tanah Datar	186.730	6,68	186.180	6,75	372.910	6,72
1305	Kabupaten Padang Pariaman	214.735	7,69	216.489	7,85	431.224	7,77
1306	Kabupaten Agam	267.277	9,57	263.259	9,54	530.536	9,56
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	190.785	6,83	192.147	6,97	382.932	6,90
1308	Kabupaten Pasaman	156.812	5,61	154.630	5,61	311.442	5,61
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	46.142	1,65	42.703	1,55	88.845	1,60
1310	Kabupaten Dharmasraya	109.309	3,91	106.032	3,84	215.341	3,88
1311	Kabupaten Solok Selatan	92.845	3,32	89.272	3,24	182.117	3,28
1312	Kabupaten Pasaman Barat	219.843	7,87	213.918	7,75	433.761	7,81
1371	Kota Padang	455.549	16,31	453.008	16,42	908.557	16,37
1372	Kota Solok	37.383	1,34	36.888	1,34	74.271	1,34
1373	Kota Sawahlunto	33.638	1,20	33.215	1,20	66.853	1,20
1374	Kota Padang Panjang	29.248	1,05	28.892	1,05	58.140	1,05
1375	Kota Bukittinggi	61.802	2,21	61.494	2,23	123.296	2,22
1376	Kota Payakumbuh	70.048	2,51	69.071	2,50	139.119	2,51
1377	Kota Pariaman	47.395	1,70	46.379	1,68	93.774	1,69
	Sumatera Barat	2.793.295	100,00	2.758.463	100,00	5.551.758	100,00

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 (diolah)

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dan gambaran ini terlihat pada hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2) *Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin*

Informasi tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu, jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai kelompok umur penduduk. Informasi jumlah dan proporsi umur penduduk dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau piramida penduduk, sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan informasi tersebut.

Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel menurut umur tunggal, kelompok umur lima tahunan atau kelompok umur yang sesuai dengan kebutuhan seperti pengelompokan umur usia sekolah.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4, yang menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2019 sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-19 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan yang terbesar berada pada kelompok umur 10-14 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50 persen) yaitu

sebesar 67,17 persen merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 25,05 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 7,78 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
00-04	201.332	7,21	186.864	6,77	388.196	6,99
05-09	265.786	9,52	246.260	8,93	512.046	9,22
10-14	277.247	9,93	257.846	9,35	535.093	9,64
15-19	264.957	9,49	252.640	9,16	517.597	9,32
20-24	252.278	9,03	240.551	8,72	492.829	8,88
25-29	213.887	7,66	201.054	7,29	414.941	7,47
30-34	204.406	7,32	196.847	7,14	401.253	7,23
35-39	210.012	7,52	202.554	7,34	412.566	7,43
40-44	189.477	6,78	187.256	6,79	376.733	6,79
45-49	164.462	5,89	167.235	6,06	331.697	5,97
50-54	143.083	5,12	151.049	5,48	294.132	5,30
55-59	123.706	4,43	135.379	4,91	259.085	4,67
60-64	106.940	3,83	118.328	4,29	225.268	4,06
65-69	79.569	2,85	84.540	3,06	164.109	2,96
70-74	39.461	1,41	49.754	1,80	89.215	1,61
> 75	56.692	2,03	80.306	2,91	136.998	2,47
Jumlah	2.793.295	100,00	2.758.463	100,00	5.551.758	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu seperempat penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.435.335 jiwa (25,05 persen). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM

yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang positif, baik di rumah maupun di masyarakat sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu bersaing memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi lain diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mampu pula menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 388.196 jiwa (6,99 persen) penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2019 merupakan balita. Kondisi ini juga menuntut perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

a) Umur Median (*Median Age*)

Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dikategorikan :

- Penduduk muda, jika umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk intermediate, jika umur median antara 20-30 tahun.
- Penduduk tua, jika umur median lebih dari 30 tahun.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Kumulatif (fx)	% Kumulatif
00-04	388.196	388.196	6,99
05-09	512.046	900.242	16,22
10-14	535.093	1.435.335	25,85
15-19	517.597	1.952.932	35,18
20-24	492.829	2.445.761	44,05
25-29	414.941	2.860.702	51,53
30-34	401.253	3.261.955	58,76
35-39	412.566	3.674.521	66,19
40-44	376.733	4.051.254	72,97
45-49	331.697	4.382.951	78,95
50-54	294.132	4.677.083	84,25
55-59	259.085	4.936.168	88,91
60-64	225.268	5.161.436	92,97
65-69	164.109	5.325.545	95,93
70-74	89.215	5.414.760	97,53
> 75	136.998	5.551.758	100,00
JUMLAH	5.551.758		

Sumber : DKB Semester II 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5, dapat dihitung umur median (*median age*) di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Umur Median (Md)} &= I_{Md} + \left(\frac{\frac{N}{2} - f_x}{f_{Md}} \times i \right) \\
 \text{Umur Median (Md)} &= 25 + \left(\frac{2.775.879 - 2.445.761}{414.941} \times 5 \right) \\
 \text{Umur Median (Md)} &= 25 + 3,98 \\
 \text{Umur Median (Md)} &= \mathbf{28,98 \text{ tahun}}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

I_{Md} = Batas bawah kelompok umur yang mengandung $N/2$

- N = Jumlah penduduk total
 f_x = Jumlah penduduk kumulatif sampai dengan kelompok umur yang mengandung $N/2$
 f_{Md} = Jumlah penduduk pada kelompok umur di mana terdapat nilai $N/2$
 i = Kelas interval umur

Dengan demikian, umur median penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah 28,98 tahun, yang berarti setengah penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 berusia dibawah 28,98 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28,98 tahun. Umur median ini terletak diantara 20-30 tahun. Dengan kata lain, penduduk Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai penduduk *intermediate* yaitu transisi dari muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

b) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (RJK), biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh :

- Rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*), biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.
- Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan.
- Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Informasi tentang rasio jenis kelamin dapat disajikan menurut kelompok umur maupun wilayah dalam bentuk tabel maupun grafik. Informasi ini dapat berguna untuk perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio jenis kelamin berdasarkan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan rasio jenis kelamin berdasarkan kelompok umur Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 tersaji pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Dari kedua tabel tersebut nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah 101,26 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101-102 orang penduduk laki-laki. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar berada pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki lebih banyak yang bermigrasi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 107,74 yang artinya terdapat 107-108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi

laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 60 tahun juga menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 6.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	257.913	253.812	511.725	101,62
2	Kabupaten Solok	194.661	193.207	387.868	100,75
3	Kabupaten Sijunjung	121.180	117.867	239.047	102,81
4	Kabupaten Tanah Datar	186.730	186.180	372.910	100,30
5	Kabupaten Padang Pariaman	214.735	216.489	431.224	99,19
6	Kabupaten Agam	267.277	263.259	530.536	101,53
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	190.785	192.147	382.932	99,29
8	Kabupaten Pasaman	156.812	154.630	311.442	101,41
9	Kabupaten Kep. Mentawai	46.142	42.703	88.845	108,05
10	Kabupaten Dharmasraya	109.309	106.032	215.341	103,09
11	Kabupaten Solok Selatan	92.845	89.272	182.117	104,00
12	Kabupaten Pasaman Barat	219.843	213.918	433.761	102,77
13	Kota Padang	455.549	453.008	908.557	100,56
14	Kota Solok	37.383	36.888	74.271	101,34
15	Kota Sawahlunto	33.638	33.215	66.853	101,27
16	Kota Padang Panjang	29.248	28.892	58.140	101,23
17	Kota Bukittinggi	61.802	61.494	123.296	100,50
18	Kota Payakumbuh	70.048	69.071	139.119	101,41
19	Kota Pariaman	47.395	46.379	93.774	102,19
	Sumatera Barat	2.793.295	2.758.463	5.551.758	101,26
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)					

Tabel 7.
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan		
00-04	201.332	186.864	388.196	107,74
05-09	265.786	246.260	512.046	107,93
10-14	277.247	257.846	535.093	107,52
15-19	264.957	252.640	517.597	104,88
20-24	252.278	240.551	492.829	104,88
25-29	213.887	201.054	414.941	106,38
30-34	204.406	196.847	401.253	103,84
35-39	210.012	202.554	412.566	103,68
40-44	189.477	187.256	376.733	101,19
45-49	164.462	167.235	331.697	98,34
50-54	143.083	151.049	294.132	94,73
55-59	123.706	135.379	259.085	91,38
60-64	106.940	118.328	225.268	90,38
65-69	79.569	84.540	164.109	94,12
70-74	39.461	49.754	89.215	79,31
> 75	56.692	80.306	136.998	70,59
Jumlah	2.793.295	2.758.463	5.551.758	101,26

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

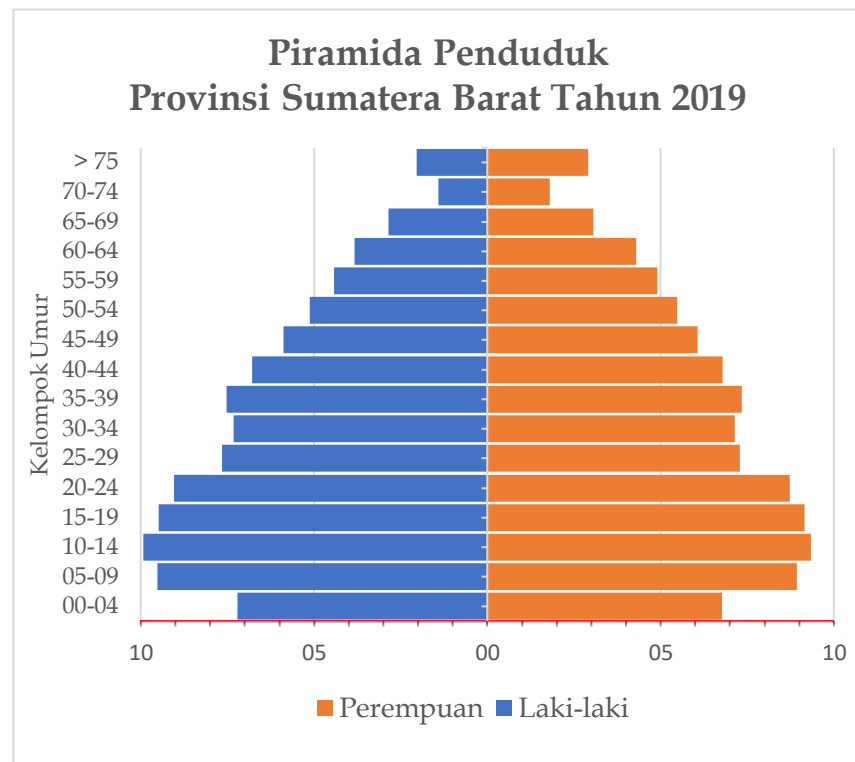
c) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase. Sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering

dibuat dengan sistem umur terbuka (75+) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki serta bagian kanan untuk penduduk perempuan.

Piramida penduduk merupakan refleksi struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dimana bentuknya ditentukan oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas).

Piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Menurut bentuknya, piramida penduduk Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dinamakan "Piramida penduduk dengan bentuk "kendi". Piramida bentuk ini biasa terdapat pada daerah/negara yang

mengalami penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun.

Sedangkan berdasarkan cirinya, Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dinamakan Konstriktif (*Constrictive*), dimana bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.

Piramida penduduk ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperhatikan umur dan jenis kelamin secara cepat dan juga berguna untuk evaluasi data kependudukan yang dikumpulkan. Piramida yang disajikan dari periode-periode yang lain dapat menunjukkan perkembangan dan kecenderungan penduduk di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita dapat mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Berdasarkan Piramida Penduduk Sumatera Barat per 31 Desember 2019, dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Sumatera Barat saat ini didominasi oleh penduduk usia muda, terutama penduduk pada usia 10-14 tahun, sehingga penyediaan pelayanan pendidikan agar dapat lebih ditingkatkan. Komposisi ini juga menunjukkan

bahwa kedepan nanti, penduduk Sumatera Barat sedang mengarah pada struktur penduduk usia produktif sehingga perlu disiapkan ketersediaan atas tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada piramida ini juga terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 7,78 persen kondisi per 31 Desember 2019. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

d) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 8, di bawah ini :

Tabel 8.
Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	% Total	Dependency Ratio
	Laki-Laki	Perempuan			
0-14 tahun (Umur Muda)	744.365	690.970	1.435.335	25,05	38,52
15-64 tahun (Umur Produktif)	1.873.208	1.852.893	3.726.101	67,17	100,00
> 65 tahun (Umur Tua)	175.722	214.600	390.322	7,78	10,48
JUMLAH	2.793.295	2.758.463	5.551.758	100,00	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Dari tabel 8 di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan total Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebesar 49 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 49 persen ini terdiri dari rasio penduduk muda sebesar 38,52 persen dan rasio penduduk tua sebesar 10,48 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja, kualitas penduduk dan tetap mempertahankan laju pertumbuhan penduduk yang rendah.

3) *Rasio Kepadatan Penduduk (Population Density Ratio)*

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada 4 (empat) klasifikasi kepadatan penduduk yaitu tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa per kilometer persegi, kurang padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa per kilometer persegi, cukup padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa per kilometer persegi dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/kilometer persegi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tergolong provinsi yang kurang padat, hal ini dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini yang memperlihatkan rasio kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019. Dengan luas 42.012,89 kilometer persegi, Provinsi Sumatera Barat didiami oleh penduduk sebesar 5.551.758 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 132,14 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019. Dengan kata lain rata-rata setiap kilometer persegi Provinsi Sumatera Barat didiami sebanyak 132 sampai dengan 133 jiwa.

Tabel 9.
Rasio Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	511.725	5.749,89	89,00
2	Kabupaten Solok	387.868	3.738,00	103,76
3	Kabupaten Sijunjung	239.047	3.130,40	76,36
4	Kabupaten Tanah Datar	372.910	1.336,10	279,10
5	Kabupaten Padang Pariaman	431.224	1.332,51	323,62
6	Kabupaten Agam	530.536	1.804,30	294,04
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	382.932	3.571,14	107,23
8	Kabupaten Pasaman	311.442	3.947,63	78,89
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.845	6.011,35	14,78
10	Kabupaten Dharmasraya	215.341	2.961,13	72,72
11	Kabupaten Solok Selatan	182.117	3.346,20	54,43
12	Kabupaten Pasaman Barat	433.761	3.887,77	111,57
13	Kota Padang	908.557	693,66	1.309,80
14	Kota Solok	74.271	71,29	1.041,82
15	Kota Sawahlunto	66.853	231,93	288,25
16	Kota Padang Panjang	58.140	23,00	2.527,83
17	Kota Bukittinggi	123.296	25,24	4.884,94
18	Kota Payakumbuh	139.119	85,22	1.632,47
19	Kota Pariaman	93.774	66,13	1.418,03
	Sumatera Barat	5.551.758	42.012,89	132,14

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 dan BPS (diolah)

Dari Tabel 9 juga terlihat bahwa rasio kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berada di Kota Bukittinggi dengan luas wilayah hanya 25,24 kilometer persegi didiami oleh penduduk sebanyak 123.296 jiwa dan rasio kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah 6.011,35 kilometer persegi didiami oleh penduduk hanya sebanyak 88.845 jiwa.

4) *Angka Pertumbuhan Penduduk*

Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disajikan pada Tabel 10, dimana dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 ke tahun 2019 termasuk rendah, karena hanya bertambah sebesar 0,59 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil pembersihan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP elektronik. Pertumbuhan Penduduk yang rendah ini sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Angka pertumbuhan penduduk diatas dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu

faktor alami yaitu kelahiran dan kematian penduduk dan faktor non alami, yaitu perpindahan penduduk (migrasi) baik migrasi masuk (datang) maupun migrasi keluar (pindah).

Tabel 10.
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan Penduduk (%)
		2018	2019	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	508.691	511.725	0,59
2	Kabupaten Siolok	384.091	387.868	0,98
3	Kabupaten Sijunjung	236.910	239.047	0,90
4	Kabupaten Tanah Datar	370.993	372.910	0,52
5	Kabupaten Padang Pariaman	427.919	431.224	0,77
6	Kabupaten Agam	528.619	530.536	0,36
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	380.173	382.932	0,72
8	Kabupaten Pasaman	318.379	311.442	(2,20)
9	Kabupaten Kep. Mentawai	87.517	88.845	1,51
10	Kabupaten Dharmasraya	212.653	215.341	1,26
11	Kabupaten Solok Selatan	180.905	182.117	0,67
12	Kabupaten Pasaman Barat	431.575	433.761	0,51
13	Kota Padang	900.922	908.557	0,84
14	Kota Solok	73.614	74.271	0,89
15	Kota Sawahlunto	66.377	66.853	0,71
16	Kota Padang Panjang	57.767	58.140	0,64
17	Kota Bukittinggi	121.590	123.296	1,39
18	Kota Payakumbuh	137.792	139.119	0,96
19	Kota Pariaman	92.758	93.774	1,09
	Sumatera Barat	5.519.245	5.551.758	0,59

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2018 dan Semester II 2019 (diolah)

Dari Tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasaman mengalami pertumbuhan penduduk yang minus (negatif), yang disebabkan karena Kabupaten Pasaman telah menemukan sebanyak 9.578 data penduduk non aktif dari hasil pelayanan perekaman KTP Elektronik door to door dan verifikasi langsung data Wajib KTP-el yang belum melaksanakan

perekaman, serta penyandingan data antar Kecamatan dalam Kabupaten.

Data penduduk non aktif yang ditemukan tersebut telah diajukan permohonan pembersihan datanya ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri melalui Surat Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pasaman Nomor 1156/DKPS-PIAK/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Permohonan Pembersihan Data Non Aktif Kabupaten Pasaman.

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentunya hasilnya akan berbeda dengan definisi diatas. Namun demikian, dalam struktur database, ketepatan pelaporan atau kejujuran masyarakat juga sangat menentukan dalam pengklasifikasian distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan ini. Oleh sebab itu sangat diharapkan sekali masyarakat agar melaporkan data-data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga database yang terbentuk menjadi akurat dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel distribusi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 11, dimana terlihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2019 sebesar 20,43 persen berpendidikan SLTA/ sederajat. Persentase penduduk perempuan yang berpendidikan SLTA sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTA. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. Sementara itu, persentase penduduk

yang tamat SLTP untuk perempuan juga lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Sedangkan pada jenjang pendidikan dasar, persentase penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, dan Diploma IV/Strata I lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hanya untuk tingkat pendidikan Strata II dan Strata III, jumlah penduduk laki-laki yang menamatkannya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 11.
Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak/ Belum Sekolah	629.024	22,52	593.426	21,51	1.222.450	22,02
Belum Tamat SD/ Sederajat	474.452	16,99	443.044	16,06	917.496	16,53
Tamat SD/ Sederajat	533.914	19,11	539.333	19,55	1.073.247	19,33
SLTP/ Sederajat	410.774	14,71	380.867	13,81	791.641	14,26
SLTA/ Sederajat	583.918	20,90	550.528	19,96	1.134.446	20,43
Diploma I/ II	10.054	0,36	27.036	0,98	37.090	0,67
Akademi/ Diploma III/ Sarmud	31.905	1,14	57.653	2,09	89.558	1,61
Diploma IV/ Strata I	108.791	3,89	157.413	5,71	266.204	4,79
Strata II	9.587	0,34	8.668	0,31	18.255	0,33
Strata III	876	0,03	495	0,02	1.371	0,02
Jumlah	2.793.295	100,00	2.758.463	100,00	5.551.758	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Ini menunjukkan bahwa kesetaraan jender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-laki bisa sedikit ditekan dan tentunya keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan kondisi diatas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dimana warga negara asing pun bisa mencari pekerjaan ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

2) *Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan*

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan gambar tersebut akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama ini diperlukan untuk merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat pada umumnya memeluk agama Islam sebanyak 97,63 persen, disusul kemudian pemeluk agama Kristen 1,47 persen, Katholik 0,84 persen. Sedangkan penganut agama Hindu hanya 91 orang (0 persen), Budha 3.612 orang (0,07 persen), Konghucu hanya 4 orang (0 persen), dan Kepercayaan sebanyak 276 orang (0 persen).

Jika dikaitkan dengan wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana terlihat pada Tabel 13, maka agama Islam mendominasi di 18 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang didominasi oleh agama Kristen dan Katholik.

Agama kedua terbesar setelah Islam yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota adalah agama Kristen. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang merupakan wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar yaitu 43.400 jiwa penganut Kristen di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 13.896 jiwa di Kota Padang. Penganut Katholik sebanyak 25.951 jiwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 12.538 jiwa di Kota Padang. Selain itu, Kota Padang juga merupakan wilayah dengan penganut agama Hindu dan Budha terbesar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Distribusi penduduk menurut agama dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan distribusi penduduk menurut agama dan Kabupaten/Kota Provinsi

Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 berikut ini :

Tabel 12.
Distribusi Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	2.725.444	97,57	2.694.528	97,68	5.419.972	97,63
Kristen	42.241	1,51	39.204	1,42	81.445	1,47
Katholik	23.538	0,84	22.820	0,83	46.358	0,84
Hindu	46	0,00	45	0,00	91	0,00
Budha	1.876	0,07	1.736	0,06	3.612	0,07
Konghucu	2	0,00	2	0,00	4	0,00
Kepercayaan	148	0,01	128	0,00	276	0,00
Jumlah	2.793.295	100,00	2.758.463	100,00	5.551.758	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2019

No	Kabupaten/Kota	Agama (Jiwa)														Total (Jiwa)	
		Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Konghucu		Kepercayaan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.688	9,42	820	1,01	212	0,46	5	5,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	511.725	9,22
2	Kabupaten Solok	387.515	7,15	319	0,39	31	0,07	3	3,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	387.868	6,99
3	Kabupaten Sijunjung	237.879	4,39	875	1,07	282	0,61	8	8,79	2	0,06	0	0,00	1	0,36	239.047	4,31
4	Kabupaten Tanah Datar	372.446	6,87	327	0,40	121	0,26	1	1,10	14	0,39	0	0,00	1	0,36	372.910	6,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.267	7,92	1.457	1,79	493	1,06	4	4,40	3	0,08	0	0,00	0	0,00	431.224	7,77
6	Kabupaten Agam	526.385	9,71	3.788	4,65	347	0,75	6	6,59	10	0,28	0	0,00	0	0,00	530.536	9,56
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	382.218	7,05	476	0,58	237	0,51	0	0,00	1	0,03	0	0,00	0	0,00	382.932	6,90
8	Kabupaten Pasaman	310.077	5,72	1.201	1,47	164	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	311.442	5,61
9	Kabupaten Kep. Mentawai	19.316	0,36	43.400	53,29	25.951	55,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	178	64,49	88.845	1,60
10	Kabupaten Dharmasraya	212.252	3,92	2.620	3,22	430	0,93	0	0,00	2	0,06	0	0,00	37	13,41	215.341	3,88
11	Kabupaten Solok Selatan	180.729	3,33	1.211	1,49	168	0,36	5	5,49	3	0,08	0	0,00	1	0,36	182.117	3,28
12	Kabupaten Pasaman Barat	424.113	7,83	6.899	8,47	2.717	5,86	0	0,00	7	0,19	0	0,00	25	9,06	433.761	7,81
13	Kota Padang	878.833	16,21	13.896	17,06	12.538	27,05	49	53,85	3.211	88,90	3	75,00	27	9,78	908.557	16,37
14	Kota Solok	73.477	1,36	515	0,63	270	0,58	0	0,00	9	0,25	0	0,00	0	0,00	74.271	1,34
15	Kota Sawahlunto	66.445	1,23	295	0,36	113	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	66.853	1,20
16	Kota Padang Panjang	57.337	1,06	379	0,47	374	0,81	0	0,00	49	1,36	1	25,00	0	0,00	58.140	1,05
17	Kota Bukittinggi	120.066	2,22	1.954	2,40	1.100	2,37	5	5,49	170	4,71	0	0,00	1	0,36	123.296	2,22
18	Kota Payakumbuh	137.488	2,54	809	0,99	686	1,48	5	5,49	131	3,63	0	0,00	0	0,00	139.119	2,51
19	Kota Pariaman	93.441	1,72	204	0,25	124	0,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1,81	93.774	1,69
	Sumatera Barat	5.419.972	100,00	81.445	100,00	46.358	100,00	91	100,00	3.612	100,00	4	100,00	276	100,00	5.551.758	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)																	

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Tabel 13. Distribusi Penduduk menurut Agama dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019.

3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Masing-masing disajikan dalam bentuk tabel menurut Kabupaten/Kota.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan jenis kelamin per 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel 14, sedangkan distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut jenis kecacatan dan Kabupaten/Kota per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14.

Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cacat Fisik	969	27,16	766	28,80	1.735	27,86
2	Cacat Netra/Buta	352	9,87	256	9,62	608	9,76
3	Cacat Rungu/Wicara	605	16,96	571	21,47	1.176	18,88
4	Cacat Mental/Jiwa	953	26,71	557	20,94	1.510	24,25
5	Cacat Fisik dan Mental	472	13,23	339	12,74	811	13,02
6	Cacat Lainnya	217	6,08	171	6,43	388	6,23
	Jumlah	3.568	100,00	2.660	100,00	6.228	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)							

Dari Tabel 14 di atas diketahui bahwa penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6.228 jiwa dengan jenis kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat fisik sebanyak 1.735 jiwa (27,86 persen) dengan persentase tertinggi pada laki-laki sebanyak 969 jiwa (27,16 persen).

Bila dilihat pada Tabel 15, dapat diketahui bahwa hampir semua jenis kecacatan, jumlah terbesarnya berada di Kabupaten Pesisir Selatan, hanya cacat lainnya yang berada di Kota Padang, sedangkan jumlah terkecil berada di Kota Payakumbuh.

Bila dibandingkan dengan data kecacatan tahun 2018 yang lalu, terjadi kenaikan jumlah kecacatan yang sangat signifikan di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 981,11 persen yaitu dari hanya sejumlah 108 penyandang cacat menjadi 1.946 penyandang sampai dengan tahun 2019. Adapun penyebab kenaikan jumlah kecacatan yang sangat signifikan ini bukan dikarenakan jumlah penyandang cacat yang memang bertambah di Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi karena sudah timbulnya kesadaran masyarakat untuk memperbaharui datanya dengan mencantumkan data yang sebenarnya termasuk dengan kecacatan yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan. Hal ini juga disebabkan karena Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki UKL di setiap Kecamatan, sehingga bisa memberikan pelayanan langsung door to door kepada masyarakat.

Hal ini menuntut perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang untuk dapat memperhatikan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi penduduk penyandang cacat (disabilitas) ini,

hususnya untuk pelayanan publik di berbagai sektor agar seluruh penduduk disabilitas ini mendapatkan prioritas pelayanan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang juga harus menyediakan Rumah Sakit khusus bagi penyandang cacat ini agar seluruh penyandang cacat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal.

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2019

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan (Jiwa)												Total (Jiwa)	
		Cacat Fisik		Cacat Netra/Buta		Cacat Rungu/Wicara		Cacat Mental/Jiwa		Cacat Fisik & Mental		Cacat Lainnya			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	723	41,67	171	28,13	282	23,98	399	26,42	345	42,54	26	6,70	1.946	31,25
2	Kabupaten Solok	53	3,05	24	3,95	38	3,23	46	3,05	27	3,33	13	3,35	201	3,23
3	Kabupaten Sijunjung	66	3,80	41	6,74	73	6,21	38	2,52	33	4,07	23	5,93	274	4,40
4	Kabupaten Tanah Datar	155	8,93	46	7,57	121	10,29	203	13,44	72	8,88	29	7,47	626	10,05
5	Kabupaten Padang Pariaman	42	2,42	23	3,78	44	3,74	75	4,97	21	2,59	11	2,84	216	3,47
6	Kabupaten Agam	126	7,26	35	5,76	54	4,59	137	9,07	41	5,06	22	5,67	415	6,66
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	18	1,04	8	1,32	24	2,04	35	2,32	5	0,62	18	4,64	108	1,73
8	Kabupaten Pasaman	117	6,74	68	11,18	115	9,78	138	9,14	57	7,03	20	5,15	515	8,27
9	Kabupaten Kep. Mentawai	15	0,86	7	1,15	7	0,60	13	0,86	5	0,62	6	1,55	53	0,85
10	Kabupaten Dharmasraya	17	0,98	9	1,48	26	2,21	12	0,79	16	1,97	7	1,80	87	1,40
11	Kabupaten Solok Selatan	22	1,27	10	1,64	24	2,04	15	0,99	18	2,22	4	1,03	93	1,49
12	Kabupaten Pasaman Barat	62	3,57	32	5,26	44	3,74	66	4,37	22	2,71	24	6,19	250	4,01
13	Kota Padang	154	8,88	62	10,20	184	15,65	152	10,07	70	8,63	109	28,09	731	11,74
14	Kota Solok	25	1,44	14	2,30	34	2,89	23	1,52	9	1,11	10	2,58	115	1,85
15	Kota Sawahlunto	44	2,54	10	1,64	45	3,83	57	3,77	34	4,19	35	9,02	225	3,61
16	Kota Padang Panjang	19	1,10	7	1,15	14	1,19	15	0,99	2	0,25	8	2,06	65	1,04
17	Kota Bukittinggi	11	0,63	15	2,47	8	0,68	18	1,19	6	0,74	9	2,32	67	1,08
18	Kota Payakumbuh	13	0,75	3	0,49	11	0,94	15	0,99	3	0,37	3	0,77	48	0,77
19	Kota Pariaman	53	3,05	23	3,78	28	2,38	53	3,51	25	3,08	11	2,84	193	3,10
	Sumatera Barat	1.735	100,00	608	100,00	1.176	100,00	1.510	100,00	811	100,00	388	100,00	6.228	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)															

Tabel 15. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019.

4) Penduduk Menurut Status Kawin

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin ini meliputi belum kawin, kawin dan cerai.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (de jure) maupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto).

Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

Distribusi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut status kawin dan jenis kelamin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini :

Tabel 16.
Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Status Kawin	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Belum Kawin	1.514.365	54,21	1.237.362	44,86	2.751.727	49,56
Kawin	1.228.220	43,97	1.260.202	45,68	2.488.422	44,82
Cerai Hidup	19.399	0,69	50.635	1,84	70.034	1,26
Cerai Mati	31.311	1,12	210.264	7,62	241.575	4,35
Jumlah	2.793.295	100,00	2.758.463	100,00	5.551.758	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2019

No	Kabupaten/Kota	Status Kawin (Jiwa)								Total (Jiwa)	
		Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	250.778	9,11	232.944	9,36	7.148	10,21	20.855	8,63	511.725	9,22
2	Kabupaten Solok	192.335	6,99	174.699	7,02	3.528	5,04	17.306	7,16	387.868	6,99
3	Kabupaten Sijunjung	114.718	4,17	112.917	4,54	2.286	3,26	9.126	3,78	239.047	4,31
4	Kabupaten Tanah Datar	175.695	6,38	170.833	6,87	5.482	7,83	20.900	8,65	372.910	6,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	222.961	8,10	179.249	7,20	6.488	9,26	22.526	9,32	431.224	7,77
6	Kabupaten Agam	267.779	9,73	225.055	9,04	8.106	11,57	29.596	12,25	530.536	9,56
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	176.376	6,41	185.127	7,44	4.032	5,76	17.397	7,20	382.932	6,90
8	Kabupaten Pasaman	161.661	5,87	132.090	5,31	3.289	4,70	14.402	5,96	311.442	5,61
9	Kabupaten Kep. Mentawai	46.982	1,71	39.017	1,57	477	0,68	2.369	0,98	88.845	1,60
10	Kabupaten Dharmasraya	97.325	3,54	109.287	4,39	1.800	2,57	6.929	2,87	215.341	3,88
11	Kabupaten Solok Selatan	90.843	3,30	82.990	3,34	2.064	2,95	6.220	2,57	182.117	3,28
12	Kabupaten Pasaman Barat	229.226	8,33	184.683	7,42	4.485	6,40	15.367	6,36	433.761	7,81
13	Kota Padang	445.742	16,20	415.837	16,71	11.993	17,12	34.985	14,48	908.557	16,37
14	Kota Solok	37.768	1,37	32.768	1,32	1.147	1,64	2.588	1,07	74.271	1,34
15	Kota Sawahlunto	31.867	1,16	30.321	1,22	1.098	1,57	3.567	1,48	66.853	1,20
16	Kota Padang Panjang	29.978	1,09	24.866	1,00	1.031	1,47	2.265	0,94	58.140	1,05
17	Kota Bukittinggi	61.835	2,25	54.820	2,20	1.884	2,69	4.757	1,97	123.296	2,22
18	Kota Payakumbuh	68.099	2,47	63.165	2,54	2.212	3,16	5.643	2,34	139.119	2,51
19	Kota Pariaman	49.759	1,81	37.754	1,52	1.484	2,12	4.777	1,98	93.774	1,69
	Sumatera Barat	2.751.727	100,00	2.488.422	100,00	70.034	100,00	241.575	100,00	5.551.758	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II 2019 (diolah)											

Tabel 17. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019.

Tabel 16 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin per 31 Desember 2019 berjumlah 2.751.727 jiwa (49,56 persen). Sementara itu, proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin meskipun hampir sama dengan perempuan, tetapi jumlahnya lebih banyak. Sedangkan, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

Banyaknya proporsi belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Jika diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk berstatus kawin dengan persentase tertinggi ada pada Kota Padang dengan jumlah 415.837 jiwa (16,71 persen), diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 232.944 jiwa (9,36 persen), sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah ada pada Kota Padang Panjang dengan jumlah 24.866 jiwa (1,00 persen), diikuti Kota Sawahlunto dengan jumlah 30.321 jiwa (1,22 persen).

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk cerai hidup dan cerai mati dengan persentase tertinggi juga ada pada Kota Padang dengan jumlah masing-masing 11.993 jiwa (17,12 persen) untuk cerai hidup dan sebanyak 34.985 (14,48 persen) untuk cerai mati.

a) Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Angka perkawinan kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 18, berikut ini :

Tabel 18.
Angka Perkawinan Kasar
Provinsi Sumatera Barat Per Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Kasar
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	4.217	8,27
2	Kabupaten Solok	385.980	3.723	9,65
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	1.834	7,71
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	3.435	9,24
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	4.279	9,96
6	Kabupaten Agam	529.578	4.750	8,97
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	3.395	8,90
8	Kabupaten Pasaman	314.911	2.742	8,71
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	133	1,51
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	1.567	7,32
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	1.414	7,79
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	3.453	7,98
13	Kota Padang	904.740	6.863	7,59
14	Kota Solok	73.943	673	9,10
15	Kota Sawahlunto	66.615	544	8,17
16	Kota Padang Panjang	57.954	390	6,73
17	Kota Bukittinggi	122.443	905	7,39
18	Kota Payakumbuh	138.456	1.179	8,52
19	Kota Pariaman	93.266	840	9,01
	Sumatera Barat	5.535.502	46.336	8,37

Sumber : DKB II 2018, DKB II 2019, dan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 18 dapat dilihat angka perkawinan kasar Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 8,37, artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dari 1.000 penduduk terdapat 8 – 9 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 8 – 9 kali terjadi peristiwa perkawinan.

b) Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebagai faktor penyebut. Sementara untuk

penduduk berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Angka perkawinan umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 tersaji dalam Tabel 19 berikut ini :

Tabel 19.
Angka Perkawinan Umum
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Umum
		Usia 15 tahun keatas	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	378.054	4.217	11,15
2	Kabupaten Solok	285.603	3.723	13,04
3	Kabupaten Sijunjung	175.974	1.834	10,42
4	Kabupaten Tanah Datar	289.694	3.435	11,86
5	Kabupaten Padang Pariaman	316.900	4.279	13,50
6	Kabupaten Agam	406.867	4.750	11,67
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	289.625	3.395	11,72
8	Kabupaten Pasaman	226.743	2.742	12,09
9	Kabupaten Kep. Mentawai	63.173	133	2,11
10	Kabupaten Dharmasraya	155.623	1.567	10,07
11	Kabupaten Solok Selatan	134.595	1.414	10,51
12	Kabupaten Pasaman Barat	309.263	3.453	11,17
13	Kota Padang	676.012	6.863	10,15
14	Kota Solok	53.603	673	12,56
15	Kota Sawahlunto	50.017	544	10,88
16	Kota Padang Panjang	42.154	390	9,25
17	Kota Bukittinggi	90.213	905	10,03
18	Kota Payakumbuh	102.069	1.179	11,55
19	Kota Pariaman	70.241	840	11,96
	Sumatera Barat	4.116.423	46.336	11,26

Sumber : DKB II Tahun 2019 dan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 19 tersebut dapat dilihat angka perkawinan umum Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 11,26, artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dari 1.000 penduduk berusia 15 tahun keatas terdapat 11 - 12 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 11 - 12 kali terjadi peristiwa perkawinan.

c) Angka Perceraian Kasar (Divorce)

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian, yang merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin.

Jumlah perceraian tahun 2019 tidak bisa didapatkan datanya dari Kantor Wilayah Kementerian Agama karena data tersebut berada di Kantor Pengadilan Agama masing-masing daerah, sehingga untuk menghitung angka perceraian kasar tahun 2019 digunakan data jumlah kepemilikan Akta Perceraian yang ada di Dinas Dukcapil masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, maka Angka perceraian kasar Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 20, yaitu sebesar 3,41, yang artinya bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dari 1.000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 3-5 kali.

Dari tabel juga terlihat bahwa angka perceraian terbesar berada di Kota Solok sebesar 10,13 dan yang terendah berada di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,48.

Tabel 20.
Angka Perceraian Kasar
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perceraian Kasar
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perceraian	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	247	0,48
2	Kabupaten Solok	385.980	1.522	3,94
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	323	1,36
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	2.033	5,47
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	998	2,32
6	Kabupaten Agam	529.578	3.099	5,85
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	865	2,27
8	Kabupaten Pasaman	314.911	378	1,20
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	40	0,45
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	329	1,54
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	418	2,30
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	966	2,23
13	Kota Padang	904.740	4.710	5,21
14	Kota Solok	73.943	749	10,13
15	Kota Sawahlunto	66.615	531	7,97
16	Kota Padang Panjang	57.954	260	4,49
17	Kota Bukittinggi	122.443	517	4,22
18	Kota Payakumbuh	138.456	514	3,71
19	Kota Pariaman	93.266	393	4,21
	Sumatera Barat	5.535.502	18.892	3,41

Sumber : DKB II 2018, DKB II 2019, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

d) Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar, karena menunjukkan penduduk berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

Angka perceraian umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 21 dibawah ini :

Tabel 21.
Angka Perceraian Umum
Provinsi Sumatera Barat Per Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perceraian Umum
		Usia 15 tahun keatas	Jumlah Perceraian	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	378.054	247	0,65
2	Kabupaten Solok	285.603	1.522	5,33
3	Kabupaten Sijunjung	175.974	323	1,84
4	Kabupaten Tanah Datar	289.694	2.033	7,02
5	Kabupaten Padang Pariaman	316.900	998	3,15
6	Kabupaten Agam	406.867	3.099	7,62
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	289.625	865	2,99
8	Kabupaten Pasaman	226.743	378	1,67
9	Kabupaten Kep. Mentawai	63.173	40	0,63
10	Kabupaten Dharmasraya	155.623	329	2,11
11	Kabupaten Solok Selatan	134.595	418	3,11
12	Kabupaten Pasaman Barat	309.263	966	3,12
13	Kota Padang	676.012	4.710	6,97
14	Kota Solok	53.603	749	13,97
15	Kota Sawahlunto	50.017	531	10,62
16	Kota Padang Panjang	42.154	260	6,17
17	Kota Bukittinggi	90.213	517	5,73
18	Kota Payakumbuh	102.069	514	5,04
19	Kota Pariaman	70.241	393	5,60
	Sumatera Barat	4.116.423	18.892	4,59

Sumber : DKB II 2018, DKB II 2019, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Sama halnya dengan angka perceraian kasar, untuk menghitung angka perceraian umum ini juga digunakan data jumlah perceraian yang berasal dari data kepemilikan akta perceraian dari Dinas Dukcapil seluruh Kabupaten/Kota, karena untuk data perceraian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama tidak ada.

Dari Tabel 21 tersebut dapat dilihat bahwa angka perceraian umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebesar 4,59 yang berarti bahwa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dari 1.000 penduduk

berusia 15 tahun keatas terjadi peristiwa perceraian sebanyak 4-5 kali.

Dari tabel juga dapat dilihat bahwa angka perceraian umum tertinggi berada di Kota Solok sebesar 4,59 dan terendah berada di Pengadilan Agama Painan, Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,65.

c. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu :

- Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi keluarga antara lain :

1) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahtraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada Tabel 22 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 sebanyak 1.556.544 keluarga yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 256.200 keluarga kemudian disusul oleh Kabupaten Agam sebanyak 146.421 keluarga, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 141.258 keluarga, dan Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 119.485 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu 16.046 keluarga.

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3,57 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang. Bila diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kabupaten/Kota juga terdiri dari 3-4 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga

berencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dapat digunakan pemerintah provinsi dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3-4 orang.

Tabel 22.

Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)		KK (Jiwa)		Rata-rata Jiwa/KK
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	511.725	9,22	141.258	9,08	3,62
2	Kabupaten Solok	387.868	6,99	107.157	6,88	3,62
3	Kabupaten Sijunjung	239.047	4,31	66.076	4,25	3,62
4	Kabupaten Tanah Datar	372.910	6,72	110.465	7,10	3,38
5	Kabupaten Padang Pariaman	431.224	7,77	119.485	7,68	3,61
6	Kabupaten Agam	530.536	9,56	146.421	9,41	3,62
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	382.932	6,90	117.994	7,58	3,25
8	Kabupaten Pasaman	311.442	5,61	86.428	5,55	3,60
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.845	1,60	23.757	1,53	3,74
10	Kabupaten Dharmasraya	215.341	3,88	63.407	4,07	3,40
11	Kabupaten Solok Selatan	182.117	3,28	49.689	3,19	3,67
12	Kabupaten Pasaman Barat	433.761	7,81	112.437	7,22	3,86
13	Kota Padang	908.557	16,37	256.200	16,46	3,55
14	Kota Solok	74.271	1,34	20.227	1,30	3,67
15	Kota Sawahlunto	66.853	1,20	19.818	1,27	3,37
16	Kota Padang Panjang	58.140	1,05	16.046	1,03	3,62
17	Kota Bukittinggi	123.296	2,22	34.812	2,24	3,54
18	Kota Payakumbuh	139.119	2,51	40.072	2,57	3,47
19	Kota Pariaman	93.774	1,69	24.795	1,59	3,78
	Sumatera Barat	5.551.758	100,00	1.556.544	100,00	3,57

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

2) Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga (SHDK)

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan,

orang tua, dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel distribusi anggota keluarga berdasarkan status hubungan dengan kepala keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 23 di bawah ini :

Tabel 23.

Distribusi Anggota Keluarga Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
01	Kepala Keluarga	1.278.879	45,78	277.665	10,07	1.556.544	28,04
02	Suami	121	0,00	0	0,00	121	0,00
03	Istri	0	0,00	1.194.973	43,32	1.194.973	21,52
04	Anak	1.443.473	51,68	1.198.552	43,45	2.642.025	47,59
05	Menantu	257	0,01	111	0,00	368	0,01
06	Cucu	15.968	0,57	12.888	0,47	28.856	0,52
07	Orang Tua	1.514	0,05	13.049	0,47	14.563	0,26
08	Mertua	3.920	0,14	30.707	1,11	34.627	0,62
09	Famili Lain	42.657	1,53	25.586	0,93	68.243	1,23
10	Pembantu	33	0,00	81	0,00	114	0,00
11	Lainnya	6.473	0,23	4.851	0,18	11.324	0,20
	TOTAL	2.793.295	100,00	2.758.463	100,00	5.551.758	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)							

Dari Tabel 23 dapat kita ketahui bahwa status hubungan keluarga dengan kepala keluarga yang terbesar adalah anak sebanyak 2.642.025 jiwa (47,59 persen). Dari Tabel 23 juga terlihat bahwa terdapat jumlah Kepala Keluarga yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 277.665 jiwa (10,07 persen). Ini terjadi karena adanya perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup yang akhirnya terpaksa menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga.

3) *Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur*

Informasi tentang kelompok umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel kepala keluarga menurut umur dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 24 di bawah, dimana terlihat bahwa kepala keluarga terbesar jumlahnya berada pada kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebanyak 193.559 jiwa (12,44 persen) dimana jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar juga berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 179.038 jiwa (14,00 persen) dan kepala keluarga perempuan terbesar berada pada kelompok umur >75 tahun sebanyak 40.817 jiwa (14,70 persen). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesempatan hidup perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan laki-laki, dimana mulai pada kelompok umur 45-49, jumlah kepala keluarga perempuan mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kepala keluarga laki-laki justru mengalami hal sebaliknya dengan mengalami penurunan. Untuk itu perlu dipersiapkan perempuan-perempuan dengan ketrampilan-ketrampilan yang dapat menunjang kehidupannya dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologi, kelak bila sudah tidak memiliki suami lagi, baik yang disebabkan karena cerai hidup maupun cerai mati.

Tabel 24.
Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	00-04	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	05-09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	10-14	12	0,00	10	0,00	22	0,00
4	15-19	741	0,06	510	0,18	1.251	0,08
5	20-24	17.397	1,36	3.670	1,32	21.067	1,35
6	25-29	75.205	5,88	7.381	2,66	82.586	5,31
7	30-34	143.173	11,20	10.929	3,94	154.102	9,90
8	35-39	179.038	14,00	14.521	5,23	193.559	12,44
9	40-44	174.936	13,68	18.376	6,62	193.312	12,42
10	45-49	156.982	12,27	22.383	8,06	179.365	11,52
11	50-54	138.495	10,83	28.293	10,19	166.788	10,72
12	55-59	120.393	9,41	33.498	12,06	153.891	9,89
13	60-64	104.448	8,17	38.489	13,86	142.937	9,18
14	65-69	77.536	6,06	34.777	12,52	112.313	7,22
15	70-74	38.021	2,97	24.011	8,65	62.032	3,99
16	> 75	52.502	4,11	40.817	14,70	93.319	6,00
Total		1.278.879	100,00	277.665	100,00	1.556.544	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai

hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern.

Tabel kepala keluarga menurut jenis kelamin dan wilayah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 disajikan dalam Tabel 25 berikut ini :

Tabel 25.
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	118.119	9,24	23.139	8,33	141.258	9,08
2	Kabupaten Solok	88.977	6,96	18.180	6,55	107.157	6,88
3	Kabupaten Sijunjung	57.626	4,51	8.450	3,04	66.076	4,25
4	Kabupaten Tanah Datar	88.821	6,95	21.644	7,80	110.465	7,10
5	Kabupaten Padang Pariaman	90.827	7,10	28.658	10,32	119.485	7,68
6	Kabupaten Agam	117.096	9,16	29.325	10,56	146.421	9,41
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	90.721	7,09	27.273	9,82	117.994	7,58
8	Kabupaten Pasaman	70.154	5,49	16.274	5,86	86.428	5,55
9	Kabupaten Kep. Mentawai	20.641	1,61	3.116	1,12	23.757	1,53
10	Kabupaten Dharmasraya	55.960	4,38	7.447	2,68	63.407	4,07
11	Kabupaten Solok Selatan	42.761	3,34	6.928	2,50	49.689	3,19
12	Kabupaten Pasaman Barat	94.956	7,42	17.481	6,30	112.437	7,22
13	Kota Padang	214.869	16,80	41.331	14,89	256.200	16,46
14	Kota Solok	17.019	1,33	3.208	1,16	20.227	1,30
15	Kota Sawahlunto	16.051	1,26	3.767	1,36	19.818	1,27
16	Kota Padang Panjang	13.035	1,02	3.011	1,08	16.046	1,03
17	Kota Bukittinggi	28.722	2,25	6.090	2,19	34.812	2,24
18	Kota Payakumbuh	33.106	2,59	6.966	2,51	40.072	2,57
19	Kota Pariaman	19.418	1,52	5.377	1,94	24.795	1,59
	Sumatera Barat	1.278.879	100,00	277.665	100,00	1.556.544	100,00
<i>Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)</i>							

Dari Tabel 25 tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Provinsi Sumatera Barat adalah laki-laki yaitu sebanyak 1.278.879 jiwa, sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 277.665 jiwa atau dengan perbandingan 5 : 1, yang artinya dari 5 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan. Hal yang sama juga terlihat pada di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dimana kepala keluarga laki-laki lebih banyak

bila dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan dengan perbandingan terbesar berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu 8 : 1, dan selanjutnya perbandingan terbesar juga terlihat di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu 7 : 1 dan yang terendah adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan perbandingan 3 : 1. Dari Tabel 25 juga dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga laki-laki terbesar berada di Kota Padang sebanyak 214.869 jiwa (16,80 persen), sedangkan untuk kepala keluarga perempuan terbesar juga berada di Kota Padang yaitu sebanyak 41.331 jiwa (14,89 persen).

5) *Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin*

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel kepala keluarga berdasarkan status kawin dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 26, dimana terlihat bahwa kepala keluarga berstatus kawin yaitu sebesar 1.270.034 jiwa (81,59 persen), dan pada umumnya laki-laki yaitu sebanyak 1.216.381 jiwa (95,11 persen). Kepala keluarga yang berstatus belum kawin hanya 33.070 jiwa (2,12 persen) saja.

Tabel 26.
Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Status Kawin	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	21.672	1,69	11.398	4,10	33.070	2,12
2	Kawin	1.216.381	95,11	53.653	19,32	1.270.034	81,59
3	Cerai Hidup	14.976	1,17	44.260	15,94	59.236	3,81
4	Cerai Mati	25.850	2,02	168.354	60,63	194.204	12,48
	Total	1.278.879	100,00	277.665	100,00	1.556.544	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)							

Meskipun demikian perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian. Kepala keluarga yang berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati, persentase perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu masing-masing 74,72 persen cerai hidup dan 86,69 persen berstatus cerai mati. Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali. Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu proporsi perempuan kepala keluarga yang

cukup besar (19,32 persen), diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2,12 persen. Proporsi kepala keluarga laki-laki yang belum kawin lebih tinggi daripada kepala keluarga perempuan. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Ada kecendrungan yang terjadi, jika seorang perempuan mengalami peristiwa perceraian baik cerai hidup maupun kematian, maka ketika dia melakukan perkawinan berikutnya, sering kali mereka tidak melaporkan perkawinannya. Ini terjadi karena kebanyakan mereka melakukan perkawinan siri baik dengan laki-laki yang sudah berstatus duda (tapi tidak cerai secara resmi) maupun dengan laki-laki yang masih berstatus suami perempuan lain, sehingga yang bersangkutan agak sungkan melaporkan perkawinan yang mereka alami. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Agama agar selalu mensosialisasikan tentang pentingnya pernikahan dilakukan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau bagi yang telah melakukan pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki buku nikah, dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama sehingga perkawinannya tercatat secara hukum negara dan diakui oleh negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi haknya secara hukum.

6) *Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan*

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga itu.

Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 27 yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga yang terbesar adalah tamat SD/ sederajat sebanyak 464.683 jiwa (29,85 persen), kemudian diikuti dengan pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 452.179 jiwa (29,05 persen), dan SLTP/ sederajat sebanyak 277.872 jiwa (17,85 persen). Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 2,76 persen dan S1/S2/S3 sebesar 7,09 persen, dan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD persentasenya mencapai 13,39 persen.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih berpendidikan SD ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga sedang berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan

penduduk Provinsi Sumatera Barat agar mempunyai daya saing global. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

Tabel 27.
Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	40.498	3,17	18.782	6,76	59.280	3,81
2	Belum Tamat SD/Sederajat	107.983	8,44	41.201	14,84	149.184	9,58
3	Tamat SD/Sederajat	358.706	28,05	105.977	38,17	464.683	29,85
4	SLTP/Sederajat	238.823	18,67	39.049	14,06	277.872	17,85
5	SLTA/Sederajat	399.092	31,21	53.087	19,12	452.179	29,05
6	Diploma I/II	8.715	0,68	3.409	1,23	12.124	0,78
7	Akademi/Diploma III/Sarmud	26.175	2,05	4.676	1,68	30.851	1,98
8	Diploma IV/Strata I	88.970	6,96	10.623	3,83	99.593	6,40
9	Strata II	9.070	0,71	760	0,27	9.830	0,63
10	Strata III	847	0,07	101	0,04	948	0,06
	Total	1.278.879	100,00	277.665	100,00	1.556.544	100,00
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)							

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa lebih separuh (59,77 persen) kepala keluarga perempuan yang tidak bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Melihat status pendidikan, umur dan jenis kelamin, nampak bahwa kepala keluarga perempuan berada pada umur yang

relatif lebih tua dan berpendidikan rendah dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki.

7) *Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja*

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota keluarga serta besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Tabel distribusi kepala keluarga menurut status bekerja dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah ini :

Tabel 28.
Distribusi Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja dan Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Status Bekerja	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	1.232.501	96,37	74.093	26,68	1.306.594	83,94
2	Belum/Tidak Bekerja	14.674	1,15	9.517	3,43	24.191	1,55
3	Pelajar/mahasiswa	4.027	0,31	2.843	1,02	6.870	0,44
4	Pensiunan	27.486	2,15	7.921	2,85	35.407	2,27
5	Mengurus Rumah Tangga	191	0,01	183.291	66,01	183.482	11,79
	Total	1.278.879	100,00	277.665	100,00	1.556.544	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keluarga yang

bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya sebesar 0,01 persen sedangkan kepala keluarga perempuan yakni sebesar 66,01 persen. Untuk kepala keluarga yang belum/tidak bekerja per kondisi 31 Desember 2019 sebanyak 24.191 jiwa (1,55 persen), dimana proporsi kepala keluarga laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan kepala keluarga perempuan. Ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan industri rumah tangga bagi ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga. Disamping itu terdapat pula kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 2,27 persen dengan proporsi jumlah pensiunan kepala keluarga laki-laki lebih besar dari pensiunan kepala keluarga perempuan. Hal ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah khususnya instansi terkait dalam hal penyediaan program-program yang memperhatikan para manula yang sudah tidak produktif lagi.

Disamping itu, dari Tabel 28 juga terlihat bahwa terdapat 6.870 jiwa (0,44 persen) kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Walau data ini perlu ditelisik lagi kebenarannya, namun demikian, bukan tidak mungkin ada kepala keluarga yang memang masih usia sekolah, dikarenakan orang tuanya sudah meninggal atau karena alasan permasalahan sosial masyarakat lainnya sehingga yang bersangkutan terpaksa menanggung beban keluarga dalam melanjutkan kehidupannya. Bagi mereka itu mungkin perlu perhatian dari Dinas Pendidikan khususnya dalam hal

menjamin ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan bagi mereka sehingga mereka bisa mandiri dan bisa mencapai cita-cita untuk masa depan yang lebih baik.

d. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran dimasa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran dimasa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran (fertilitas) adalah :

1) Jumlah Kelahiran

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

Jumlah Kelahiran Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tersaji pada Tabel 29 di bawah ini :

Tabel 29.
Jumlah Kelahiran Hidup
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup (Jiwa)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1.568
2	Kabupaten Solok	9.050
3	Kabupaten Sijunjung	6.802
4	Kabupaten Tanah Datar	4.188
5	Kabupaten Padang Pariaman	4.545
6	Kabupaten Agam	7.105
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.220
8	Kabupaten Pasaman	6.436
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6.267
10	Kabupaten Dharmasraya	2.700
11	Kabupaten Solok Selatan	3.854
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.287
13	Kota Padang	15.897
14	Kota Solok	1.420
15	Kota Sawahlunto	998
16	Kota Padang Panjang	1.029
17	Kota Bukittinggi	2.131
18	Kota Payakumbuh	2.632
19	Kota Pariaman	1.612
	SUMATERA BARAT	92.741

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 29 tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah sebanyak 92.741 dengan jumlah kelahiran hidup terbesar berada di Kota Padang sebesar 15.897 kelahiran, yang memang Kota Padang adalah Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat. Sedangkan kelahiran hidup terendah berada di Kota Sawahlunto yaitu hanya sebesar 998 kelahiran.

Untuk jumlah kelahiran hidup tahun 2019 ini, Dinas Kesehatan tidak memberikan data jumlah kelahiran hidup berdasarkan

jenis kelamin, sehingga tidak diketahui perbandingan jumlah kelahiran hidup antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

2) *Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)*

Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 30, yaitu sebesar 16,75, yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2019 terjadi 16-17 kelahiran hidup.

Secara Kabupaten/Kota, dari Tabel 30 juga dapat dilihat CBR terbesar berada di Kabupaten Pasaman yaitu sebesar 19,90, ini berarti selama tahun 2019, dari 1.000 penduduk Kabupaten Pasaman, terdapat sebanyak 19-20 kelahiran hidup. Sedangkan CBR yang terendah berada di Kabupaten Agam yaitu sebesar 11,75, yang berarti bahwa selama tahun 2019, dari 1.000 penduduk Agam, hanya terjadi sebanyak 11-12 kelahiran hidup.

Tabel 30.
Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Crude Birth Rate (CDR)
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Kelahiran	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	9.050	17,74
2	Kabupaten Solok	385.980	6.802	17,62
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	4.188	17,60
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	4.545	12,22
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	7.105	16,54
6	Kabupaten Agam	529.578	6.220	11,75
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	6.436	16,87
8	Kabupaten Pasaman	314.911	6.267	19,90
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	1.568	17,78
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	3.854	18,01
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	2.700	14,88
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	8.287	19,15
13	Kota Padang	904.740	15.897	17,57
14	Kota Solok	73.943	1.420	19,20
15	Kota Sawahlunto	66.615	998	14,98
16	Kota Padang Panjang	57.954	1.029	17,76
17	Kota Bukittinggi	122.443	2.131	17,40
18	Kota Payakumbuh	138.456	2.632	19,01
19	Kota Pariaman	93.266	1.612	17,28
	Sumatera Barat	5.535.502	92.741	16,75

Sumber : DKB II 2018, DKB II 2019, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (diolah)

3) Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)

Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tersaji pada Tabel 31, dimana data jumlah kematian merupakan data pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diperoleh dari pelaporan kematian yang dilakukan oleh penduduk yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 31.
Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Crude Death Rate (CDR)
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Kematian	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	8.143	15,96
2	Kabupaten Solok	385.980	6.576	17,04
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	1.060	4,45
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	9.567	25,72
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	2.606	6,07
6	Kabupaten Agam	529.578	6.526	12,32
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	167	0,44
8	Kabupaten Pasaman	314.911	1.212	3,85
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	21	0,24
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	602	2,81
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	270	1,49
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	2.210	5,11
13	Kota Padang	904.740	1.925	2,13
14	Kota Solok	73.943	328	4,44
15	Kota Sawahlunto	66.615	417	6,26
16	Kota Padang Panjang	57.954	456	7,87
17	Kota Bukittinggi	122.443	427	3,49
18	Kota Payakumbuh	138.456	1.311	9,47
19	Kota Pariaman	93.266	2.564	27,49
	Sumatera Barat	5.535.502	46.388	8,38

Sumber : DKB II 2018, DKB II 2019, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 31 dapat diketahui bahwa angka kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebesar 8,38 yang artinya bahwa dari 1.000 penduduk Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2019 terjadi 8-9 kematian.

2. Kualitas Penduduk

a. Kesehatan

1) Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio anak dan perempuan ini digunakan untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk.

Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio/CWR*) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 32 di bawah ini :

Tabel 32.
Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Perempuan Usia 15-49	Penduduk Usia 0-4 Tahun	Rasio Anak dan Perempuan
1	Kabupaten Pesisir Selatan	133.888	35.842	26,77
2	Kabupaten Solok	101.377	26.795	26,43
3	Kabupaten Sijunjung	63.601	17.053	26,81
4	Kabupaten Tanah Datar	91.874	20.818	22,66
5	Kabupaten Padang Pariaman	107.597	29.101	27,05
6	Kabupaten Agam	132.253	31.024	23,46
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	98.093	23.906	24,37
8	Kabupaten Pasaman	82.173	22.186	27,00
9	Kabupaten Kep. Mentawai	23.801	6.014	25,27
10	Kabupaten Dharmasraya	58.725	16.250	27,67
11	Kabupaten Solok Selatan	49.921	13.240	26,52
12	Kabupaten Pasaman Barat	119.183	34.207	28,70
13	Kota Padang	240.039	68.691	28,62
14	Kota Solok	20.148	6.214	30,84
15	Kota Sawahlunto	17.102	5.021	29,36
16	Kota Padang Panjang	15.357	4.833	31,47
17	Kota Bukittinggi	32.451	9.322	28,73
18	Kota Payakumbuh	36.124	10.795	29,88
19	Kota Pariaman	24.430	6.884	28,18
	Sumatera Barat	1.448.137	388.196	26,81
Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 (diolah)				

Dari Tabel 32 tersebut menunjukkan angka CWR Provinsi Sumatera Barat sebesar 26,81 persen artinya bahwa pada tahun 2019 per 31 Desember 2019 terdapat 26 sampai dengan 27 anak dibawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun.

Bila diklasifikasikan berdasarkan Kabupaten/Kota, persentase *Child Woman Ratio (CWR)* terbesar berada pada Kota Padang Panjang yaitu sebesar 31,47 persen, selanjutnya adalah Kota Solok dengan *Child Woman Ratio (CWR)* sebesar 30,84 persen, sedangkan untuk persentase *Child Woman Ratio (CWR)* terkecil berada pada Kabupaten Tanah Datar, yaitu sebesar 22,66 persen.

2) *Kematian (Mortalitas)*

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh : faktor sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab yang lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup

yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare, yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah :

a) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian *bayi endogen* atau yang umum disebut dengan *kematian neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau post-neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar

Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Untuk Provinsi Sumatera Barat, AKB/IMR tahun 2019 dapat dilihat dari Tabel 33 di bawah ini :

Tabel 33.
Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Bayi		AKB/IMR
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.050	9,76	78	9,63	8,62
2	Kabupaten Solok	6.802	7,33	60	7,41	8,82
3	Kabupaten Sijunjung	4.188	4,52	58	7,16	13,85
4	Kabupaten Tanah Datar	4.545	4,90	48	5,93	10,56
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.105	7,66	30	3,70	4,22
6	Kabupaten Agam	6.220	6,71	73	9,01	11,74
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.436	6,94	60	7,41	9,32
8	Kabupaten Pasaman	6.267	6,76	28	3,46	4,47
9	Kabupaten Kep. Mentawai	1.568	1,69	39	4,81	24,87
10	Kabupaten Dharmasraya	3.854	4,16	52	6,42	13,49
11	Kabupaten Solok Selatan	2.700	2,91	10	1,23	3,70
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.287	8,94	94	11,60	11,34
13	Kota Padang	15.897	17,14	106	13,09	6,67
14	Kota Solok	1.420	1,53	7	0,86	4,93
15	Kota Sawahlunto	998	1,08	21	2,59	21,04
16	Kota Padang Panjang	1.029	1,11	7	0,86	6,80
17	Kota Bukittinggi	2.131	2,30	8	0,99	3,75
18	Kota Payakumbuh	2.632	2,84	9	1,11	3,42
19	Kota Pariaman	1.612	1,74	22	2,72	13,65
	Sumatera Barat	92.741	100,00	810	100,00	8,73

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Dari Tabel 33 terlihat bahwa selama tahun 2019, dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat, terjadi kematian bayi sebanyak 8-9 orang. Kematian bayi terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 24-25 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi ini cukup tinggi, dan faktor yang menyebabkannya adalah rendahnya tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai standar, rendahnya tingkat pendidikan dan status ekonomi

masyarakat terhadap perawatan kehamilan sesuai yang dianjurkan, kurangnya partisipasi keluarga, masyarakat dan lintas program dalam program kesehatan ibu dan anak, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita serta kurangnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

b) Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Angka kematian neonatal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini :

Tabel 34.
Angka Kematian Neonatal (Neo-Natal Death Rate/NNDR)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		AK Neonatal
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.050	9,76	72	12,65	7,96
2	Kabupaten Solok	6.802	7,33	41	7,21	6,03
3	Kabupaten Sijunjung	4.188	4,52	33	5,80	7,88
4	Kabupaten Tanah Datar	4.545	4,90	39	6,85	8,58
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.105	7,66	24	4,22	3,38
6	Kabupaten Agam	6.220	6,71	48	8,44	7,72
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.436	6,94	37	6,50	5,75
8	Kabupaten Pasaman	6.267	6,76	0	0,00	0,00
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.568	1,69	18	3,16	11,48
10	Kabupaten Dharmasraya	3.854	4,16	36	6,33	9,34
11	Kabupaten Solok Selatan	2.700	2,91	7	1,23	2,59
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.287	8,94	84	14,76	10,14
13	Kota Padang	15.897	17,14	79	13,88	4,97
14	Kota Solok	1.420	1,53	4	0,70	2,82
15	Kota Sawahlunto	998	1,08	11	1,93	11,02
16	Kota Padang Panjang	1.029	1,11	5	0,88	4,86
17	Kota Bukittinggi	2.131	2,30	3	0,53	1,41
18	Kota Payakumbuh	2.632	2,84	7	1,23	2,66
19	Kota Pariaman	1.612	1,74	21	3,69	13,03
	Sumatera Barat	92.741	100,00	569	100,00	6,14
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)						

Dari Tabel 34 dapat dilihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, terjadi kematian bayi neonatal sebanyak 6-7 bayi. Kematian bayi neonatal terbanyak terdapat di Kota Pariaman yaitu sebanyak 13 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi neonatal ini disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia (kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir, TN (gangguan pernafasan pada bayi baru lahir yang berlangsung singkat), sepsis (infeksi darah yang terjadi pada bayi yang baru lahir), kelainan bawaan, dan penyebab lainnya.

c) Angka Kematian Post Neo-Natal (Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR)

Kematian post neo-natal (*post neo-natal death rate/PNNDR*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Angka Kematian Post Neo-Natal Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 35, dimana dari 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, terjadi kematian bayi post neo-natal sebanyak 2-3 bayi dengan kematian bayi post neo-natal terbesar berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 13-14 bayi dan yang terendah adalah Kota Pariaman, dengan kematian bayi post neo-natal pada tahun 2019 hanya sebanyak 0-1 bayi.

Adapun penyebab kematian bayi post neo-natal ini adalah karena beberapa penyakit seperti pneumonia (paru-paru basah), diare, kelainan saraf, tetanus malaria, dan penyakit lainnya.

Tabel 35.
Angka Kematian Post Neonatal (*Post Neo-Natal Death Rate/PNNDR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Post Neonatal		AK Post Neonatal
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.050	9,76	6	2,71	0,66
2	Kabupaten Solok	6.802	7,33	19	8,60	2,79
3	Kabupaten Sijunjung	4.188	4,52	25	11,31	5,97
4	Kabupaten Tanah Datar	4.545	4,90	9	4,07	1,98
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.105	7,66	6	2,71	0,84
6	Kabupaten Agam	6.220	6,71	25	11,31	4,02
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.436	6,94	23	10,41	3,57
8	Kabupaten Pasaman	6.267	6,76	8	3,62	1,28
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.568	1,69	21	9,50	13,39
10	Kabupaten Dharmasraya	3.854	4,16	16	7,24	4,15
11	Kabupaten Solok Selatan	2.700	2,91	3	1,36	1,11
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.287	8,94	10	4,52	1,21
13	Kota Padang	15.897	17,14	27	12,22	1,70
14	Kota Solok	1.420	1,53	3	1,36	2,11
15	Kota Sawahlunto	998	1,08	10	4,52	10,02
16	Kota Padang Panjang	1.029	1,11	2	0,90	1,94
17	Kota Bukittinggi	2.131	2,30	5	2,26	2,35
18	Kota Payakumbuh	2.632	2,84	2	0,90	0,76
19	Kota Pariaman	1.612	1,74	1	0,45	0,62
	Sumatera Barat	92.741	100,00	221	100,00	2,38

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (diolah)

d) Angka Kematian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berusia 1 sampai menjelang 5 tahun. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak juga dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam/di sekitar rumah.

Angka kematian anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini :

Tabel 36.
Angka Kematian Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 1-4 Tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Anak		AK Anak
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	31.765	9,33	7	6,19	0,22
2	Kabupaten Solok	23.998	7,05	10	8,85	0,42
3	Kabupaten Sijunjung	14.776	4,34	7	6,19	0,47
4	Kabupaten Tanah Datar	18.196	5,34	13	11,50	0,71
5	Kabupaten Padang Pariaman	25.845	7,59	1	0,88	0,04
6	Kabupaten Agam	27.992	8,22	9	7,96	0,32
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	20.922	6,14	10	8,85	0,48
8	Kabupaten Pasaman	19.399	5,70	4	3,54	0,21
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.476	1,61	4	3,54	0,73
10	Kabupaten Dharmasraya	14.807	4,35	11	9,73	0,74
11	Kabupaten Solok Selatan	11.645	3,42	1	0,88	0,09
12	Kabupaten Pasaman Barat	29.728	8,73	14	12,39	0,47
13	Kota Padang	59.362	17,43	10	8,85	0,17
14	Kota Solok	5.384	1,58	1	0,88	0,19
15	Kota Sawahlunto	4.335	1,27	5	4,42	1,15
16	Kota Padang Panjang	4.083	1,20	2	1,77	0,49
17	Kota Bukittinggi	8.099	2,38	1	0,88	0,12
18	Kota Payakumbuh	8.949	2,63	1	0,88	0,11
19	Kota Pariaman	5.790	1,70	2	1,77	0,35
	Sumatera Barat	340.548	100,00	113	100,00	0,33

Sumber : DKB II Tahun 2018, DKB II Tahun 2019, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 36 di atas terlihat bahwa angka kematian anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah 0,33 yang berarti dari 1.000 anak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, terdapat 0-1 kematian anak, dimana angka kematian anak tertinggi terdapat di Kota Sawahlunto yaitu sebesar 1,15 (1-2) kematian anak dari 1.000 anak.

Kematian anak ini diantaranya disebabkan oleh penyakit seperti diare, pneumonia, demam berdarah dan lainnya. Oleh karena itu faktor kesehatan lingkungan sangat perlu

diperhatikan untuk mendukung kesehatan anak, karena pada usia ini anak sedang aktif-aktifnya melakukan eksplorasi terhadap berbagai hal yang ingin diketahuinya.

e) Angka Kematian Balita

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi baru lahir berumur 0 tahun sampai dengan menjelang tepat 5 tahun (0-4 tahun).

Angka kematian Balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 37 dibawah ini :

Tabel 37.
Angka Kematian Balita
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia <5 tahun pada Pertengahan Tahun		Kematian Balita		AK Balita
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	34.906	9,15	85	9,21	2,44
2	Kabupaten Solok	26.216	6,87	70	7,58	2,67
3	Kabupaten Sijunjung	16.736	4,39	65	7,04	3,88
4	Kabupaten Tanah Datar	20.406	5,35	61	6,61	2,99
5	Kabupaten Padang Pariaman	28.575	7,49	31	3,36	1,08
6	Kabupaten Agam	30.967	8,12	82	8,88	2,65
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	23.508	6,16	70	7,58	2,98
8	Kabupaten Pasaman	21.374	5,60	32	3,47	1,50
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.888	1,54	43	4,66	7,30
10	Kabupaten Dharmasraya	16.526	4,33	63	6,83	3,81
11	Kabupaten Solok Selatan	12.899	3,38	11	1,19	0,85
12	Kabupaten Pasaman Barat	32.895	8,62	108	11,70	3,28
13	Kota Padang	68.320	17,91	116	12,57	1,70
14	Kota Solok	6.154	1,61	8	0,87	1,30
15	Kota Sawahlunto	5.022	1,32	26	2,82	5,18
16	Kota Padang Panjang	4.737	1,24	9	0,98	1,90
17	Kota Bukittinggi	9.206	2,41	9	0,98	0,98
18	Kota Payakumbuh	10.327	2,71	10	1,08	0,97
19	Kota Pariaman	6.751	1,77	24	2,60	3,56
	Sumatera Barat	381.406	100,00	923	100,00	2,42

Sumber : DKB II Tahun 2018, DKB II Tahun 2019, dan Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (diolah)

Dari Tabel 37 tersebut dapat diketahui angka kematian balita Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebesar 2,42, ini berarti bahwa dari 1.000 balita di Provinsi Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2019, terjadi kematian balita sebanyak 2-3 balita, dimana angka kematian balita tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 7,30 atau 7-8 kematian balita dari 1.000 balita yang ada.

Penyebab kematian balita ini selain karena faktor yang dibawa anak sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya, pengaruh lingkungan luar, seperti tingkat kecukupan gizi, tingginya prevelensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau disekitar rumah.

f) Angka Kematian Ibu (Maternity Mortality Rate/MMR)

Kematian ibu ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

Angka kematian ibu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini :

Tabel 38.
Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal (Jiwa)				AKI
			Hamil	Bersalin	Nifas	Jumlah	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	9.050	3	0	5	8	88,40
2	Kabupaten Solok	6.802	5	1	8	14	205,82
3	Kabupaten Sijunjung	4.188	5	1	0	6	143,27
4	Kabupaten Tanah Datar	4.545	4	1	0	5	110,01
5	Kabupaten Padang Pariaman	7.105	4	2	0	6	84,45
6	Kabupaten Agam	6.220	3	0	4	7	112,54
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	6.436	5	2	4	11	170,91
8	Kabupaten Pasaman	6.267	3	5	2	10	159,57
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.568	0	3	0	3	191,33
10	Kabupaten Dharmasraya	3.854	5	1	0	6	155,68
11	Kabupaten Solok Selatan	2.700	4	0	0	4	148,15
12	Kabupaten Pasaman Barat	8.287	6	2	0	8	96,54
13	Kota Padang	15.897	4	2	10	16	100,65
14	Kota Solok	1.420	0	1	0	1	70,42
15	Kota Sawahlunto	998	3	0	0	3	300,60
16	Kota Padang Panjang	1.029	0	0	0	0	0,00
17	Kota Bukittinggi	2.131	2	0	0	2	93,85
18	Kota Payakumbuh	2.632	0	2	0	2	75,99
19	Kota Pariaman	1.612	2	1	1	4	248,14
	Sumatera Barat	92.741	58	24	34	116	125,08
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (dialah)							

Dari Tabel 38 terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Barat dari 100.000 kelahiran hidup pada pertengahan tahun 2019 terjadi 125-126 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin. Kematian ibu terbesar terjadi di Kota Sawahlunto yaitu sebanyak 300-301 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab kematian ibu ini adalah karena perdarahan, HDK (hipertensi dalam kehamilan), infeksi, gangguan peredaran darah, gangguan metabolisme, dan lainnya.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk baik di daerah maupun nasional. Untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan suatu daerah, dibutuhkan beberapa data. Database kependudukan dapat memberikan beberapa yang berhubungan dengan informasi perkembangan pendidikan maupun untuk menghitung beberapa indikator untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah. Data jumlah penduduk menurut usia sekolah SD, SLTP, dan SLTA Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut ini :

Tabel 39.
Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Usia Pendidikan	JENIS KELAMIN (JIWA)				Total (Jiwa)	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Usia SD (7-12 Tahun)	330.008	50,75	306.413	50,36	636.421	50,56
Usia SLTP (13-15 Tahun)	168.265	25,88	157.106	25,82	325.371	25,85
Usia SLTA (16-18 Tahun)	152.009	23,38	144.910	23,82	296.919	23,59
Total	650.282	100,00	608.429	100,00	1.258.711	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya presentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum dimasing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar (APK)/*gross enrollment ratio* (GER) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut ini :

Tabel 40.
Angka Partisipasi Kasar (APK)/ *Gross Enrollment Ratio* (GER)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Student)	Penduduk (*) (Population)	APK (GER)
SD/Primary School	664.813	636.421	104,46
a. SD	631.591		
b. SLB	4.644		
c. MI	24.272		
d. Paket A	3.956		
e. ULA	350		
SLTP/Junior SS	325.602	325.371	100,07
a. SMP	214.590		
b. SLB	1.609		
c. MTs	96.838		
d. Paket B	10.961		
e. Wustha	1.604		
SLTA/Senior SS	270.165	296.919	90,99
a. SMA	134.024		
b. SLB	684		
c. MA	33.363		
d. SMK	86.893		
e. Paket C	14.410		
f. Ulya	791		

Sumber : DKB II Tahun 2019, Kemendikbud dan Kemenag (diolah)

Dari Tabel 40 tersebut dapat diketahui bahwa APK Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 104,46 persen, ini berarti pada jenjang

pendidikan SD ini banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SD/ sederajat atau sebaliknya adanya siswa yang lebih muda dari usia standar (7-12 tahun) yang masuk jenjang pendidikan SD.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut masuk sekolah pada usia yang lebih muda. Hal ini juga berlaku untuk jenjang pendidikan SLTP, karena APK untuk jenjang SLTP di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 diatas 100 persen yaitu sebesar 100,07 persen yang berarti masih ada anak-anak usia diatas 15 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SLTP/ sederajat atau sebaliknya masih adanya siswa yang lebih muda dari usia standar (13-15 tahun) yang masuk jenjang pendidikan SLTP.

Sementara untuk jenjang pendidikan SLTA APK masih berada di bawah 100 persen yang berarti jumlah murid usia berapapun yang bersekolah pada jenjangSLTA masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia SLTA.

2) *Angka Partisipasi Murni (APM)*

Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK, karena melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Angka Partisipasi Murni (APM)/ *Net Enrollment Ratio (NER)* Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 41, dimana APM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 untuk

jenjang pendidikan SD/Sederajat adalah 89,79 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 89-90 orang bersekolah dibangku SD/Sederajat. APM penduduk usia 13-15 tahun yang duduk dibangku SLTP/Sederajat sebesar 69,75 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, 69-70 orang bersekolah dibangku SLTP/Sederajat, sedangkan APM penduduk usia 16-18 tahun yang duduk dibangku SLTA/Sederajat sebesar 63,42 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, 63-64 orang bersekolah dibangku SLTA/Sederajat. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi murid yang tinggal kelas, lambat masuk sekolah atau terlalu cepat sekolah.

Tabel 41.
Angka Partisipasi Murni (APM)/ *Net Enrollment Ratio (NER)*
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Jenjang Pendidikan (Level of Education)	Siswa/Mahasiswa (Pupils/Student)	Penduduk (*) (Population)	APM (NER)
SD/Primary School	571.445	636.421	89,79
a. SD	546.127		
b. SLB	2.761		
c. MI	21.730		
d. Paket A	558		
e. ULA	269		
SLTP/Junior SS	226.959	325.371	69,75
a. SMP	150.669		
b. SLB	525		
c. MTs	72.955		
d. Paket B	1.752		
e. Wustha	1.058		
SLTA/Senior SS	188.315	296.919	63,42
a. SMA	100.744		
b. SLB	201		
c. MA	26.163		
d. SMK	58.317		
e. Paket C	2.371		
f. Ulya	519		
Sumber : DKB II Tahun 2019, Kemendikbud dan Kemenag (diolah)			

3) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah yang disajikan hanya berdasarkan data murid putus sekolah yang ada untuk jenjang pendidikan SD (SD), untuk jenjang pendidikan SLTP (SMP), serta jenjang pendidikan SLTA (SMA dan SMK) yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Angka Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada Tabel 42 berikut ini :

Tabel 42.
Angka Putus Sekolah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Murid Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APS)
SD	664.813	1.352	0,20
SLTP	325.602	1.568	0,48
SLTA	270.165	2.812	1,04

Sumber : Kemendikbud dan Kemenag (diolah)

Dari Tabel 42 tersebut dapat diketahui bahwa angka putus sekolah terbesar adalah untuk jenjang pendidikan SLTA. Beberapa penyebab murid putus sekolah diantaranya adalah karena kurangnya motivasi atau keinginan dari dalam diri anak itu sendiri untuk bersekolah. Selain itu faktor kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab lain seorang murid putus sekolah. Tidak dipungkiri, meskipun sudah ada dana yang dialokasikan pemerintah dalam hal pendidikan pada saat ini, tidak lantas menjadikan pendidikan di Sumatera Barat menjadi gratis sepenuhnya, karena masih ada biaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai pendidikan tersebut, seperti biaya transportasi, biaya untuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah, dan lainnya. Dengan kondisi tersebut, bagi orang tua

dengan kondisi ekonomi yang rendah akan terbebani, karena penghasilan orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, sehingga keberlangsungan pendidikan anak akan terhambat.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih berperan aktif untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi ekonomi orang tua yang terbatas agar mereka tetap dapat melanjutkan sekolah paling tidak sampai lulus jenjang pendidikan SLTA agar mereka bisa memiliki bekal ilmu dan keahlian untuk terjun ke dunia kerja sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

c. Ekonomi

Indonesia telah meratifikasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan ini telah diaplikasikan dalam penyusunan statistik terkait ketenagakerjaan sehingga berdasarkan statistik dan indeks pembangunan ketenagakerjaan yang diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Angkatan Kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

1) *Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja*

a) *Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja*

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Jumlah dan proporsi tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 43 di bawah ini, dimana pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat kondisi per 31 Desember 2019 adalah sebesar 4.116.423 jiwa atau 74,15persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja tersebut harus diikuti permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) yang cukup pula, agar tidak akan terjadi pengangguran yang cukup besar. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memikirkan tersedianya kesempatan kerja ini di masing-masing daerahnya.

Tabel 43.
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Usia Kerja (15 Tahun Keatas)	Jumlah Penduduk	Persen Naker
1	Kabupaten Pesisir Selatan	378.054	511.725	73,88
2	Kabupaten Solok	285.603	387.868	73,63
3	Kabupaten Sijunjung	175.974	239.047	73,61
4	Kabupaten Tanah Datar	289.694	372.910	77,68
5	Kabupaten Padang Pariaman	316.900	431.224	73,49
6	Kabupaten Agam	406.867	530.536	76,69
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	289.625	382.932	75,63
8	Kabupaten Pasaman	226.743	311.442	72,80
9	Kabupaten Kep. Mentawai	63.173	88.845	71,10
10	Kabupaten Dharmasraya	155.623	215.341	72,27
11	Kabupaten Solok Selatan	134.595	182.117	73,91
12	Kabupaten Pasaman Barat	309.263	433.761	71,30
13	Kota Padang	676.012	908.557	74,41
14	Kota Solok	53.603	74.271	72,17
15	Kota Sawahlunto	50.017	66.853	74,82
16	Kota Padang Panjang	42.154	58.140	72,50
17	Kota Bukittinggi	90.213	123.296	73,17
18	Kota Payakumbuh	102.069	139.119	73,37
19	Kota Pariaman	70.241	93.774	74,90
	Sumatera Barat	4.116.423	5.551.758	74,15
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)				

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur)

Jumlah dan proporsi angkatan kerja (bekerja dan menganggur) ini dapat dilihat pada Tabel 44, dimana dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar 2.599.013 jiwa dengan jumlah angkatan kerja terbanyak berada di Kota Padang yaitu sebesar 436.811 jiwa dan angkatan kerja terkecil berada di Kota Padang Panjang sebanyak 25.863 jiwa. Untuk penduduk bekerja dan menganggur, jumlah terbanyak juga berada di Kota Padang yaitu masing-masing sebesar 398.561 jiwa dan 38.250 jiwa. Sementara itu untuk

jumlah penduduk bekerja dan pengangguran terkecil berada di Kota Padang Panjang yaitu masing-masing sebesar 24.739 jiwa 1.124 jiwa.

Tabel 44.
Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Tenaga Kerja
		Bekerja	Menganggur	Jumlah Angker	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	209.277	12.987	222.264	378.054
2	Kabupaten Solok	174.780	8.525	183.305	285.603
3	Kabupaten Sijunjung	110.511	4.220	114.731	175.974
4	Kabupaten Tanah Datar	168.968	5.486	174.454	289.694
5	Kabupaten Padang Pariaman	170.516	10.828	181.344	316.900
6	Kabupaten Agam	230.930	11.452	242.382	406.867
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	194.888	4.538	199.426	289.625
8	Kabupaten Pasaman	126.798	6.975	133.773	226.743
9	Kabupaten Kep. Mentawai	47.201	1.420	48.621	63.173
10	Kabupaten Dharmasraya	116.604	6.244	122.848	155.623
11	Kabupaten Solok Selatan	80.731	4.168	84.899	134.595
12	Kabupaten Pasaman Barat	185.371	9.016	194.387	309.263
13	Kota Padang	398.561	38.250	436.811	676.012
14	Kota Solok	28.933	2.209	31.142	53.603
15	Kota Sawahlunto	29.117	2.132	31.249	50.017
16	Kota Padang Panjang	24.739	1.124	25.863	42.154
17	Kota Bukittinggi	58.456	3.827	62.283	90.213
18	Kota Payakumbuh	63.182	2.710	65.892	102.069
19	Kota Pariaman	40.991	2.348	43.339	70.241
	Sumatera Barat	2.460.554	138.459	2.599.013	4.116.423

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

2) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15 tahun keatas terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam

kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 45 dimana dari hasil perhitungan diperoleh APAK Provinsi Sumatera Barat sebesar 63,14 persen, artinya 63,14 persen penduduk usia 15 tahun keatas tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.

Dari Tabel 45 terlihat bahwa penduduk yang berumur 15-19 tahun mempunyai APAK paling rendah yaitu sebesar 21,12 persen, sedangkan penduduk yang berumur 45-49 tahun memiliki APAK paling tinggi yaitu sebesar 82,56 persen.

Tabel 45.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Bukan Angker	Jumlah Tenaga Kerja	APAK
	Bekerja	Menganggur	Jumlah Angker			
15-19	90.450	18.865	109.315	408.282	517.597	21,12
20-24	237.829	62.071	299.900	192.929	492.829	60,85
25-29	292.538	27.553	320.091	94.850	414.941	77,14
30-34	299.487	9.003	308.490	92.763	401.253	76,88
35-39	287.756	4.809	292.565	120.001	412.566	70,91
40-44	282.399	5.423	287.822	88.911	376.733	76,40
45-49	268.926	4.913	273.839	57.858	331.697	82,56
50-54	234.840	2.872	237.712	56.420	294.132	80,82
55-59	191.037	1.818	192.855	66.230	259.085	74,44
> 60	275.292	1.132	276.424	339.166	615.590	44,90
Jumlah	2.460.554	138.459	2.599.013	1.517.410	4.116.423	63,14

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

3) *Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan*

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu.

Indikator ini berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 46, dimana dapat diketahui bahwa persentase jenis pekerjaan terbanyak yang menjadi sumber pendapatan penduduk Sumatera Barat adalah wiraswasta sebesar 51,37 persen, diikuti oleh jenis pekerjaan pertanian/peternakan sebesar 35,26 persen.

Dari proporsi jenis pekerjaan tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk Sumatera Barat memiliki karakteristik tersendiri dalam memilih pekerjaan sebagai sumber pendapatannya yaitu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan individu dan tidak banyak bergantung pada orang lain. Kebanyakan pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan dibidang yang menawarkan jasa dan perdagangan. Namun demikian, dengan persentase yang relatif masih cukup besar yaitu lebih dari sepertiga penduduk bekerja yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan, maka dapat juga dikatakan masyarakat Sumatera Barat masih merupakan bagian dari masyarakat agraris.

Jika dilihat proporsi per wilayah Kabupaten/Kota jenis pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan penduduk untuk wilayah Kabupaten lebih banyak didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan dibidang pertanian/peternakan, selanjutnya diikuti oleh penduduk yang memiliki jenis pekerjaan wiraswasta, kecuali Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Dharmasraya yang telah didominasi oleh penduduk yang memiliki pekerjaan dibidang wiraswasta. Sementara di tujuh Kota yang ada di Sumatera Barat, penduduknya lebih banyak memiliki jenis pekerjaan sebagai wiraswata dan aparatur/ pejabat negara. Artinya di daerah perkotaan penduduk sudah mulai meninggalkan jenis pekerjaan yang bersifat agraris, kecuali di dua daerah kota yaitu Sawahlunto sebesar 16,04 persen dan Payakumbuh sebesar 14,90 persen penduduknya relatif masih cukup banyak yang memiliki jenis pekerjaan di bidang pertanian/peternakan.

**PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2019

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan																	
		Aparatur/ Pejabat Negara		Tenaga Pengajar		Wiraswasta		Pertanian/ Peternakan		Nelayan		Agama/ Kepercayaan		Kesehatan		Lainnya		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%		
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	9.597	6,36	2.539	1,68	52.993	35,14	74.400	49,33	10.503	6,96	69	0,05	669	0,44	54	0,04	150.824	
1302	Kabupaten Solok	7.356	6,09	1.595	1,32	47.184	39,07	64.076	53,06	156	0,13	25	0,02	376	0,31	2	0,00	120.770	
1303	Kabupaten Sijunjung	4.818	6,19	1.549	1,99	29.019	37,27	41.968	53,90	33	0,04	41	0,05	414	0,53	23	0,03	77.865	
1304	Kabupaten Tanah Datar	8.862	7,09	2.654	2,12	60.617	48,47	51.882	41,49	291	0,23	124	0,10	596	0,48	36	0,03	125.062	
1305	Kabupaten Padang Pariaman	7.900	6,30	1.345	1,07	74.899	59,73	38.483	30,69	1.744	1,39	479	0,38	541	0,43	15	0,01	125.406	
1306	Kabupaten Agam	11.469	6,67	3.831	2,23	97.351	56,62	56.700	32,98	1.715	1,00	152	0,09	696	0,40	26	0,02	171.940	
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	8.048	6,43	1.214	0,97	54.531	43,54	60.996	48,70	55	0,04	48	0,04	345	0,28	7	0,01	125.244	
1308	Kabupaten Pasaman	6.050	5,04	1.259	1,05	37.469	31,20	74.830	62,31	26	0,02	28	0,02	420	0,35	3	0,00	120.085	
1309	Kabupaten Kep. Mentawai	2.305	8,59	692	2,58	6.457	24,06	14.440	53,81	2.486	9,26	159	0,59	288	1,07	6	0,02	26.833	
1310	Kabupaten Dharmasraya	4.368	5,75	1.664	2,19	40.196	52,92	29.089	38,30	19	0,03	26	0,03	577	0,76	13	0,02	75.952	
1311	Kabupaten Solok Selatan	4.323	7,49	611	1,06	24.948	43,23	27.427	47,52	16	0,03	18	0,03	337	0,58	34	0,06	57.714	
1312	Kabupaten Pasaman Barat	6.703	4,69	3.305	2,31	52.624	36,84	73.780	51,65	5.246	3,67	47	0,03	1.097	0,77	48	0,03	142.850	
1371	Kota Padang	46.631	15,80	12.449	4,22	216.735	73,44	10.792	3,66	4.858	1,65	280	0,09	3.244	1,10	140	0,05	295.129	
1372	Kota Solok	4.785	19,45	540	2,19	17.223	70,00	1.766	7,18	7	0,03	24	0,10	260	1,06	0	0,00	24.605	
1373	Kota Sawahlunto	3.451	15,59	343	1,55	14.607	66,00	3.549	16,04	4	0,02	21	0,09	140	0,63	16	0,07	22.131	
1374	Kota Padang Panjang	3.617	17,52	1.058	5,12	14.435	69,91	1.219	5,90	10	0,05	28	0,14	279	1,35	2	0,01	20.648	
1375	Kota Bukittinggi	6.157	13,92	1.947	4,40	34.288	77,54	1.105	2,50	15	0,03	60	0,14	643	1,45	3	0,01	44.218	
1376	Kota Payakumbuh	6.955	14,94	1.424	3,06	30.866	66,29	6.936	14,90	7	0,02	38	0,08	336	0,72	1	0,00	46.563	
1377	Kota Pariaman	4.873	17,00	698	2,44	19.511	68,08	2.089	7,29	1.137	3,97	48	0,17	287	1,00	14	0,05	28.657	
	Sumatera Barat	158.268	8,78	40.717	2,26	925.953	51,37	635.527	35,26	28.328	1,57	1.715	0,10	11.545	0,64	443	0,02	1.802.496	
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 (diolah)																			

Tabel 46. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

4) Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, *trend* indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 47 berikut ini :

Tabel 47.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Kelompok Umur (Tahun)	Angkatan Kerja (Jiwa)			Jumlah Bukan Angker	Jumlah Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angker			
15-19	90.450	18.865	109.315	408.282	517.597	17,26
20-24	237.829	62.071	299.900	192.929	492.829	20,70
25-29	292.538	27.553	320.091	94.850	414.941	8,61
30-34	299.487	9.003	308.490	92.763	401.253	2,92
35-39	287.756	4.809	292.565	120.001	412.566	1,64
40-44	282.399	5.423	287.822	88.911	376.733	1,88
45-49	268.926	4.913	273.839	57.858	331.697	1,79
50-54	234.840	2.872	237.712	56.420	294.132	1,21
55-59	191.037	1.818	192.855	66.230	259.085	0,94
> 60	275.292	1.132	276.424	339.166	615.590	0,41
Jumlah	2.460.554	138.459	2.599.013	1.517.410	4.116.423	5,33

Sumber : DKB Semester II Tahun 2019 dan Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat (diolah)

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Pada Tabel 47 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera

Barat sebesar 5,33 persen, artinya 5,33 persen penduduk berusia 15 tahun keatas berusaha terlibat di dalam kegiatan produktif. Angka pengangguran terbesar terlihat pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 20,70 persen, sedangkan yang terkecil adalah pada kelompok umur diatas 60 tahun yaitu sebesar 0,41 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan masing-masing Kabupaten/Kota untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan yang lebih luas khususnya bagi penduduk yang baru lulus SLTA atau perguruan tinggi baik lulusan D1/D3/D4/ maupun Sarjana.

d. Sosial

1) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) telah direvisi menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Adapun jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 ini dapat dilihat pada Tabel 48, dimana terdapat 26 (dua puluh enam) jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat dengan jenis PPKS tertinggi adalah fakir miskin yaitu sebanyak 784.660 Kepala Keluarga dimana bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 484.838 Kepala Keluarga, jumlah fakir miskin ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang berarti sangat memerlukan perhatian khusus

dari pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengatasi dan mengurangi jumlah fakir miskin ini.

Bila dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga di Sumatera Barat per 31 Desember 2019 yang sejumlah 1.556.544KK, maka persentase jumlah fakir miskin di Provinsi Sumatera Barat cukup besar yaitu sebesar 50,41 persen.

Menurut Basis Data Terpadu (BDT) untuk jumlah fakir miskin di Provinsi Sumatera Barat yang sudah lolos verifikasi dan validasi di pusat (Kementerian Sosial) untuk menerima bantuan sampai dengan kondisi Juli 2019 adalah sejumlah 474.625 Kepala Keluarga atau 1.982.662 jiwa sebagaimana terlihat pada Tabel 49.

Ini berarti hanya sebesar 60,49 persen Kepala Keluarga (KK) yang baru bisa diberikan bantuan dari jumlah fakir miskin hasil verifikasi yang dilakukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada pada data PPKS.

Sementara itu, untuk jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terendah adalah pekerja migran bermasalah sosial yaitu sebanyak 21 jiwa. Jumlah ini juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun lalu yang hanya sejumlah 12 jiwa. Hal ini juga menuntut pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lebih memperhatikan masuknya pekerja migran ini agar tidak lagi terjadi peningkatan jumlah di tahun selanjutnya.

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2019

No	Jenis PPKS	Kabupaten												Kota							Sumatera Barat
		Pessel	Solok	Sijunjung	T.Datar	P. Prmn	Agam	50 Kota	Pasaman	Mentawai	Drmsrya	Solsel	Pasbar	Padang	Solok	Swlunto	P.Panjang	B.Tinggi	Pykbmh	Prmn	
1	Anak Balita Terlantar	137	17	25	0	1	4	3	7	37	11	2	0	1	0	20	1	0	16	61	343
2	Anak Terlantar	1.657	17	510	354	251	730	294	197	46	64	139	323	1.300	412	53	57	1	62	237	6.704
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	69	17	24	49	26	3	27	16	3	32	4	15	128	18	0	6	2	10	6	455
4	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	8	0	1	25	128	0	0	122	3	10	0	9	5	8	319
5	Anak Dengan Kedisabilitas	381	0	317	560	44	0	98	252	97	394	60	157	1.630	36	129	64	74	165	98	4.556
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	54	0	12	0	32	35	0	3	0	0	0	15	128	0	0	0	0	2	1	282
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	864	0	2	49	0	13	0	29	0	454	0	15	128	0	6	0	6	3	1	1.570
8	Lanjut Usia Terlantar	3.118	122	8.868	1.600	130	3.365	16.472	1.780	3.673	2	1.327	52	275	422	769	266	383	220	444	43.288
9	Penyandang Disabilitas	2.429	101	1.040	1.610	1.329	2.140	3.578	699	423	573	180	482	3.230	227	472	211	195	277	459	19.655
10	Tuna Susila	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	1	1	33
11	Gelandangan	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	6	3	1	0	0	5	1	1	24
12	Pengemis	0	22	0	0	0	0	0	23	0	3	0	56	25	18	1	3	12	15	17	195
13	Pemulung	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	54	88	49	22	1	39	62	52	372
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	3	3	0	23
15	Bekas Warga Binaan Lapas (BWBLP)	0	0	0	205	25	176	15	163	0	9	0	80	217	73	23	0	11	48	31	1.076
16	Orang Dengan HIV/ AIDS	0	0	0	27	51	37	0	2	0	25	0	2	375	0	0	0	0	2	3	524
17	Korban Penyalahgunaan Nepza	69	0	1	63	30	0	0	25	1	4	0	2	13	55	4	13	7	39	18	344
18	Korban Traficking	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	6
19	Korban Tindak Kekerasan	98	0	242	0	0	0	172	1	0	4	0	0	4	0	6	0	0	7	3	537
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	1	21
21	Korban Bencana Alam	1.657	59	23	84	174	117	2.613	44	0	2.538	0	24	0	4	103	0	0	0	3	7.443
22	Korban bencana Sosial	26	58	31	156	108	101	108	2	0	49	50	0	2	8	2	0	0	7	2	710
23	Perempuan Rawan Sosial	6.543	0	870	2.450	0	0	500	1.322	529	870	1.424	1.329	5.050	396	481	259	724	491	801	24.039
24	Fakir Miskin	45.346	20.545	87.480	35.241	165.889	43.979	161.720	0	17.562	66.726	14.023	43.692	53.760	1.425	1.582	2.985	5.744	9.946	7.015	784.660
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	25	0	0	232	0	31	0	19	0	416	0	0	290	155	9	3	240	7	26	1.453
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.498
	Total	62.473	20.958	99.448	42.681	168.104	50.744	185.600	4.593	24.858	72.340	17.209	46.321	66.795	3.303	3.692	3.869	7.462	11.391	9.289	901.130
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (diolah)																					

Tabel 48. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019.

Tabel 49.
Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin
Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Jan 2019 (KK)	BDT 2019 (Periode Januari RT)	BDT 2019 (Periode Januari Jiwa)	BDT 2019 (Periode Juli 2019 RT)	BDT 2019 (Periode Juli 2019 Jiwa)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	21.868	45.288	180.810	45.346	200.702
2	Kabupaten Solok	20.545	38.380	150.520	39.608	167.131
3	Kabupaten Sijunjung	10.799	21.580	88.039	21.606	87.480
4	Kabupaten Tanah Datar	16.771	35.377	129.381	33.921	130.408
5	Kabupaten Padang Pariaman	19.615	37.160	167.069	37.142	165.902
6	Kabupaten Agam	22.189	43.808	181.350	43.533	181.315
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	22.451	42.636	160.486	42.636	160.486
8	Kabupaten Pasaman	18.174	34.281	140.438	34.502	140.471
9	Kabupaten Kep. Mentawai	9.273	17.562	68.931	17.324	67.325
10	Kabupaten Dharmasraya	8.609	16.969	66.492	16.026	66.492
11	Kabupaten Solok Selatan	8.269	14.023	56.461	14.023	56.461
12	Kabupaten Pasaman Barat	23.987	43.757	183.174	43.103	178.757
13	Kota Padang	25.281	53.000	242.403	53.467	241.766
14	Kota Solok	2.175	3.415	14.870	3.391	14.625
15	Kota Sawahlunto	999	2.778	11.133	2.696	11.386
16	Kota Padang Panjang	2.002	3.403	15.108	2.985	13.148
17	Kota Bukittinggi	2.889	6.105	26.068	5.949	24.749
18	Kota Payakumbuh	6.476	9.946	42.580	9.891	40.073
19	Kota Pariaman	2.834	7.015	34.082	7.476	34.085
	Sumatera Barat	245.206	476.483	1.959.395	474.625	1.982.762

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (diolah)

2) *Proporsi Penduduk Penyandang Cacat*

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah penduduk penyandang cacat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 50, yang menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat, penduduk penyandang cacat fisik adalah yang terbanyak yaitu sebesar 1.735 jiwa (27,86 persen), diikuti oleh penyandang cacat mental/jiwa sebanyak 1.510 jiwa

(24,25 persen), sedangkan yang terkecil adalah penyandang cacat lainnya yaitu sebesar 388 jiwa (6,23 persen).

Tabel 50.
Jumlah Penduduk Penyandang Cacat Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin (Jiwa)				Total (Jiwa)	
		Laki-Laki		Perempuan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Cacat Fisik	969	27,16	766	28,80	1.735	27,86
2	Cacat Netra/Buta	352	9,87	256	9,62	608	9,76
3	Cacat Rungu/Wicara	605	16,96	571	21,47	1.176	18,88
4	Cacat Mental/Jiwa	953	26,71	557	20,94	1.510	24,25
5	Cacat Fisik dan Mental	472	13,23	339	12,74	811	13,02
6	Cacat Lainnya	217	6,08	171	6,43	388	6,23
	Jumlah	3.568	100,00	2.660	100,00	6.228	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Sementara itu, untuk Angka Penyandang Cacat (APC) Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 51, dimana angka penduduk penyandang cacat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,11 persen, artinya bahwa sebagian kecil penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang menyandang cacat. Namun ini tetap harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka. Bila diklasifikasikan menurut Kabupaten/Kota, maka angka penyandang cacat terbesar berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar 0,38 persen, diikuti oleh Kota Sawahlunto sebesar 0,34 persen dan Kota Pariaman sebesar 0,21 persen. Sedangkan angka penyandang cacat yang terkecil berada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang hanya sebesar 0,03 persen.

Angka Penyandang Cacat ini bisa saja terjadi peningkatan setiap tahunnya bila penduduk sudah semakin sadar untuk

melakukan pembaharuan data dan dapat memberikan data yang sebenar-benarnya, termasuk untuk kondisi kecacatan bilan memang penduduk tersebut adalah penyandang cacat. Untuk itu, sangat diperlukan peran serta pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua pihak terkait agar penyandang cacat tetap mendapatkan pelayanan terbaik dalam semua aspek kehidupannya termasuk menyiapkan semua fasilitas penunjang yang dapat mempermudah para penyandang cacat, khususnya di kantor-kantor/instansi pelayanan publik.

Tabel 51.
Angka Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan (Jiwa)						Jumlah Penduduk	APC
		Cacat Fisik	Cacat Netra/ Buta	Cacat Rungu/ Wicara	Cacat Mental/ Jiwa	Cacat Fisik & Mental	Cacat Lainnya		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	723	171	282	399	345	26	511.725	0,38
2	Kabupaten Solok	53	24	38	46	27	13	387.868	0,05
3	Kabupaten Sijunjung	66	41	73	38	33	23	239.047	0,11
4	Kabupaten Tanah Datar	155	46	121	203	72	29	372.910	0,17
5	Kabupaten Padang	42	23	44	75	21	11	431.224	0,05
6	Kabupaten Agam	126	35	54	137	41	22	530.536	0,08
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	18	8	24	35	5	18	382.932	0,03
8	Kabupaten Pasaman	117	68	115	138	57	20	311.442	0,17
9	Kabupaten Kep. Mentawai	15	7	7	13	5	6	88.845	0,06
10	Kabupaten Dharmasraya	17	9	26	12	16	7	215.341	0,04
11	Kabupaten Solok Selatan	22	10	24	15	18	4	182.117	0,05
12	Kabupaten Pasaman Barat	62	32	44	66	22	24	433.761	0,06
13	Kota Padang	154	62	184	152	70	109	908.557	0,08
14	Kota Solok	25	14	34	23	9	10	74.271	0,15
15	Kota Sawahlunto	44	10	45	57	34	35	66.853	0,34
16	Kota Padang Panjang	19	7	14	15	2	8	58.140	0,11
17	Kota Bukittinggi	11	15	8	18	6	9	123.296	0,05
18	Kota Payakumbuh	13	3	11	15	3	3	139.119	0,03
19	Kota Pariaman	53	23	28	53	25	11	93.774	0,21
	Sumatera Barat	1.735	608	1.176	1.510	811	388	5.551.758	0,11
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)									

3. Mobilitas Penduduk

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun non permanen akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari Provinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

- 1) Migrasi Masuk (Mi).
- 2) Migrasi Keluar (Mo).
- 3) Migrasi Neto (Mn).
- 4) Migrasi Bruto (Mb).
- 5) Persentase migrasi dari perdesaan ke perkotaan.

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (Kabupaten/Kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

a. Angka Migrasi Masuk (*in-migration*/Mi)

Angka migrasi masuk per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 52, dimana dapat diketahui bahwa angka migrasi masuk untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 9,64, ini berarti selama tahun 2019 ada

sebanyak 9-10 orang penduduk yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat per 1.000 penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 52.
Angka Migrasi Masuk Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Angka Migrasi Masuk
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk			
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Total	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	2.924	6.255	9.179	17,99
2	Kabupaten Solok	385.980	3.114	2.895	6.009	15,57
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	1.132	1.187	2.319	9,74
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	2.409	4.392	6.801	18,28
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	3.368	5.968	9.336	21,73
6	Kabupaten Agam	529.578	3.153	4.990	8.143	15,38
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	2.314	3.121	5.435	14,24
8	Kabupaten Pasaman	314.911	3.911	2.490	6.401	20,33
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	383	257	640	7,26
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	1.139	1.386	2.525	11,80
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	1.375	1.180	2.555	14,08
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	5.150	7.001	12.151	28,08
13	Kota Padang	904.740	7.455	6.960	14.415	15,93
14	Kota Solok	73.943	1.649	714	2.363	31,96
15	Kota Sawahlunto	66.615	609	542	1.151	17,28
16	Kota Padang Panjang	57.954	1.302	661	1.963	33,87
17	Kota Bukittinggi	122.443	2.483	1.131	3.614	29,52
18	Kota Payakumbuh	138.456	1.647	1.046	2.693	19,45
19	Kota Pariaman	93.266	1.802	1.191	2.993	32,09
20	Sumatera Barat	5.535.502		53.367		9,64

Sumber : DKB II Tahun 2018, DKB II Tahun 2019, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, angka migrasi tertinggi berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 33,87 yang berarti selama tahun 2019 ada sebanyak 33-34 orang penduduk yang masuk ke Kota Padang Panjang per 1.000 penduduk yang ada di Kota Padang Panjang. Sementara itu, angka migrasi masuk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu hanya sebesar 7,26, ini berarti pada tahun 2019 hanya sebanyak 7-8 orang penduduk yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tingginya angka migrasi masuk ke Kota Padang Panjang ini disebabkan karena Kota Padang Panjang merupakan salah satu Kota dengan jumlah penduduk terkecil dengan luas wilayah yang hanya terdiri dari 2 Kecamatan, dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata kuliner di Provinsi Sumatera Barat sehingga peluang kerja di sektor pariwisata di Kota Padang Panjang ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk bisa tinggal dan bekerja di Padang Panjang.

Sementara itu, rendahnya angka migrasi masuk ke Kabupaten Kepulauan Mentawai disebabkan karena faktor geografis berupa Kabupaten yang terdiri dari kepulauan, sehingga lebih banyak hanya penduduk asli yang ada, dan tidak adanya daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk tinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai kecuali pegawai yang memang ditempatkan disana.

b. Angka Migrasi Keluar (*out-migration*/Mo)

Angka migrasi keluar per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 53, dimana secara Provinsi, angka migrasi keluar adalah sebesar 11,62 yang berarti pada tahun 2019, ada sebanyak 11-12 penduduk yang keluar dari Provinsi Sumatera Barat dari 1.000 penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, angka migrasi keluar terbesar sebagaimana terlihat pada tabel tersebut terdapat pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 30,71, dimana ini berarti pada tahun 2019 ada sebanyak 30-31 orang penduduk yang keluar dari Kabupaten Padang Pariaman dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan angka migrasi keluar

terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 8,05, dimana berarti selama tahun 2019 terdapat 8 orang penduduk yang keluar (pindah) dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dari 1.000 penduduk yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 53.
Angka Migrasi Keluar Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Angka Migrasi Keluar
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Keluar			
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Total	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	2.696	6.298	8.994	17,63
2	Kabupaten Solok	385.980	3.188	3.969	7.157	18,54
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	1.760	1.753	3.513	14,76
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	2.959	5.339	8.298	22,31
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	3.887	9.305	13.192	30,71
6	Kabupaten Agam	529.578	4.722	6.580	11.302	21,34
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	2.163	3.164	5.327	13,96
8	Kabupaten Pasaman	314.911	5.232	3.550	8.782	27,89
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	383	327	710	8,05
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	1.968	2.519	4.487	20,97
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	1.391	1.546	2.937	16,18
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	2.229	3.526	5.755	13,30
13	Kota Padang	904.740	7.663	10.154	17.817	19,69
14	Kota Solok	73.943	982	733	1.715	23,19
15	Kota Sawahlunto	66.615	705	602	1.307	19,62
16	Kota Padang Panjang	57.954	668	731	1.399	24,14
17	Kota Bukittinggi	122.443	1.658	1.336	2.994	24,45
18	Kota Payakumbuh	138.456	1.564	1.360	2.924	21,12
19	Kota Pariaman	93.266	1.073	1.513	2.586	27,73
20	Sumatera Barat	5.535.502		64.305		11,62

Sumber : DKB II Tahun 2018, DKB II Tahun 2019, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

Tingginya angka migrasi keluar dari Kabupaten Padang Pariaman ini disebabkan karena lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang dekat dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, migrasi juga

dilakukan keluar Provinsi Sumatera Barat (merantau) ketempat sanak saudara yang telah berhasil (faktor budaya).

Sementara rendahnya angka migrasi keluar dari Kabupaten Kepulauan Mentawai disebabkan oleh faktor geografis berupa Kabupaten yang terdiri dari kepulauan sehingga penduduknya membutuhkan biaya yang lebih besar untuk melakukan migrasi keluar, karena akses perhubungan dan sarana transportasi yang kurang memadai baik kuantitas dan kualitas. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi keluar, karena akan sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan.

c. Angka Migrasi Neto (*nett-migration/Mn*)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar, dimana apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif, sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Angka migrasi neto per Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 54, dimana dapat diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Migrasi Neto Positif, dimana 4 (empat) diantaranya adalah daerah Kota. Sedangkan 12 (dua belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Angka Migrasi Neto Negatif, dimana 9 (sembilan) diantaranya adalah daerah Kabupaten. Dari kedua hal ini kembali menunjukan bahwa Kota memiliki daya tarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi baik dari sisi kesempatan kerja yang lebih luas maupun kualitas pendidikan yang lebih baik.

Sementara itu, untuk Provinsi Sumatera Barat, Angka Migrasi Neto adalah Negatif, ini berarti lebih banyak penduduk Sumatera Barat yang keluar (pindah) dibandingkan yang datang, untuk merantau ke kota khususnya ke kota di pulau Jawa, baik untuk bekerja maupun sekolah karena kesempatan kerja yang lebih luas maupun kualitas pendidikan yang lebih baik.

Tabel 54.
Angka Migrasi Neto Per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Angka Migrasi Neto	Jenis Migrasi Neto
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	510.208	9.179	8.994	0,36	Positif
2	Kabupaten Solok	385.980	6.009	7.157	-2,97	Negatif
3	Kabupaten Sijunjung	237.979	2.319	3.513	-5,02	Negatif
4	Kabupaten Tanah Datar	371.952	6.801	8.298	-4,02	Negatif
5	Kabupaten Padang Pariaman	429.572	9.336	13.192	-8,98	Negatif
6	Kabupaten Agam	529.578	8.143	11.302	-5,97	Negatif
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	381.553	5.435	5.327	0,28	Positif
8	Kabupaten Pasaman	314.911	6.401	8.782	-7,56	Negatif
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.181	640	710	-0,79	Negatif
10	Kabupaten Dharmasraya	213.997	2.525	4.487	-9,17	Negatif
11	Kabupaten Solok Selatan	181.511	2.555	2.937	-2,10	Negatif
12	Kabupaten Pasaman Barat	432.668	12.151	5.755	14,78	Positif
13	Kota Padang	904.740	14.415	17.817	-3,76	Negatif
14	Kota Solok	73.943	2.363	1.715	8,76	Positif
15	Kota Sawahlunto	66.615	1.151	1.307	-2,34	Negatif
16	Kota Padang Panjang	57.954	1.963	1.399	9,73	Positif
17	Kota Bukittinggi	122.443	3.614	2.994	5,06	Positif
18	Kota Payakumbuh	138.456	2.693	2.924	-1,67	Negatif
19	Kota Pariaman	93.266	2.993	2.586	4,36	Positif
20	Sumatera Barat	5.535.502	53.367	64.305	-1,98	Negatif

Sumber : DKB II Tahun 2018, DKB II Tahun 2019, dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)

d. Transmigrasi

Beberapa tujuan yang melatarbelakangi program atau kegiatan transmigrasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerataan dan persebaran penduduk.

2) Peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi.

3) Pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi.

Selama tahun 2019 tidak terdapat data transmigrasi, baik untuk transmigran masuk dan keluar berdasarkan penempatan transmigrasi per Kabupaten/Kota, transmigrasi berdasarkan jenis transmigrasi, serta transmigrasi berdasarkan pola transmigrasi.

Bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, terdapat transmigran masuk ke Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru yaitu sebanyak 192 KK (736 jiwa). Transmigran tersebut diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 120 KK (440 jiwa) dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 10 KK (31 jiwa), yang keseluruhannya merupakan jenis transmigrasi umum dengan pola transmigrasi pertanian tanaman pangan.

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase kepemilikan kartu keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Kartu Keluarga.

Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 55, dimana dapat dilihat, persentase kepemilikan kartu keluarga dari jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebesar 93,60 persen dengan persentase terbesar berada di Kota Sawahlunto yaitu

sebesar 99,38 persen, sementara persentase terkecil berada di Kota Pariaman yaitu sebesar 85,75 persen.

Tabel 55.
Kepemilikan Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Kepemilikan KK	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	141.258	137.768	97,53
2	Kabupaten Solok	107.157	101.066	94,32
3	Kabupaten Sijunjung	66.076	63.393	95,94
4	Kabupaten Tanah Datar	110.465	97.687	88,43
5	Kabupaten Padang Pariaman	119.485	106.390	89,04
6	Kabupaten Agam	146.421	135.492	92,54
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	117.994	110.176	93,37
8	Kabupaten Pasaman	86.428	77.107	89,22
9	Kabupaten Kep. Mentawai	23.757	21.062	88,66
10	Kabupaten Dharmasraya	63.407	62.316	98,28
11	Kabupaten Solok Selatan	49.689	45.934	92,44
12	Kabupaten Pasaman Barat	112.437	106.979	95,15
13	Kota Padang	256.200	244.603	95,47
14	Kota Solok	20.227	19.816	97,97
15	Kota Sawahlunto	19.818	19.696	99,38
16	Kota Padang Panjang	16.046	15.860	98,84
17	Kota Bukittinggi	34.812	32.845	94,35
18	Kota Payakumbuh	40.072	34.361	85,75
19	Kota Pariaman	24.795	24.332	98,13
	Sumatera Barat	1.556.544	1.456.883	93,60
Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)				

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki KTP-el.

Pada Tabel 56 dapat dilihat bahwa kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar 95,19 persen dari total wajib KTP yang ada, dimana kepemilikan KTP-el tertinggi berada di Kota Bukittinggi dengan capaian 99,81 persen

dan terendah berada di Kabupaten Solok Selatan dengan capaian baru sebesar 86,28 persen.

Tabel 56.
Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Wajib KTP (Jiwa)	Kepemilikan KTP-el (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	356.679	336.959	94,47
2	Kabupaten Solok	269.209	262.957	97,68
3	Kabupaten Sijunjung	166.237	154.633	93,02
4	Kabupaten Tanah Datar	275.747	263.632	95,61
5	Kabupaten Padang Pariaman	297.710	290.748	97,66
6	Kabupaten Agam	386.508	352.524	91,21
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	274.337	268.963	98,04
8	Kabupaten Pasaman	213.485	190.531	89,25
9	Kabupaten Kep. Mentawai	58.926	56.431	95,77
10	Kabupaten Dharmasraya	148.739	147.603	99,24
11	Kabupaten Solok Selatan	126.978	109.552	86,28
12	Kabupaten Pasaman Barat	290.154	264.152	91,04
13	Kota Padang	643.795	629.831	97,83
14	Kota Solok	50.750	49.678	97,89
15	Kota Sawahlunto	47.654	45.865	96,25
16	Kota Padang Panjang	39.981	39.666	99,21
17	Kota Bukittinggi	85.596	85.433	99,81
18	Kota Payakumbuh	96.960	95.443	98,44
19	Kota Pariaman	66.653	64.152	96,25
	SUMATERA BARAT	3.896.098	3.708.753	95,19

Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Dari Tabel 56 juga dapat dilihat bahwa capaian kepemilikan KTP-el untuk Kota secara umum lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten. Hal ini dapat dipahami karena jumlah penduduk dan cakupan wilayah Kota lebih kecil bila dibandingkan Kabupaten. Meskipun seluruh Kabupaten telah melakukan pelayanan keliling jemput bola, namun capaiannya masih belum bisa melewati capaian yang dimiliki oleh Kota secara umum. Untuk itu, Kabupaten harus bisa meningkatkan lagi inovasi-inovasi pelayanannya agar capaian kepemilikan KTP-el nya dapat

mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya untuk mengejar target wajib KTP yang ada agar semua wajib KTP memiliki KTP-el. Bila dibandingkan dengan capaian kepemilikan KTP-el tahun 2018 yang sebesar 90,82, terjadi progres kenaikan capaian Kepemilikan KTP-el sebesar 4,37% pada tahun 2019 ini.

c. Kepemilikan Akta

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki akta kelahiran per 31 Desember 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 57, yaitu hanya sebesar 44,96 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Namun, capaian persentase kepemilikan akta lahir penduduk tahun 2019 ini, mengalami progres kenaikan 4,35 persen bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang memiliki capaian presentase kepemilikan sebesar 40,60 persen.

Pada Tabel 57 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk tertinggi berada di Kota Padang Panjang dengan capaian sebesar 85,60 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Dharmasraya dengan capaian hanya sebesar 35,43 persen. Angka capaian ini masih sangat rendah dan ini menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran, khususnya untuk penduduk yang sudah berusia 18 tahun keatas karena mereka merasa tidak lagi memerlukan dokumen akta kelahiran ini.

Untuk itu, kepemilikan akta kelahiran ini hanya ditargetkan untuk penduduk yang berusia 0-18 tahun, dimana pada tahun 2019 ditargetkan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun adalah 85 persen dari jumlah penduduk usia 0-18 tahun.

Untuk kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 58, dimana persentasenya sudah mencapai 88,83 persen dimana mengalami progres kenaikan sebesar 5,12 persen bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2018 yang sebesar 83,71 persen.

Tabel 57.
Kepemilikan Akta Kelahiran Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	511.725	238.693	46,64
2	Kabupaten Solok	387.868	174.738	45,05
3	Kabupaten Sijunjung	239.047	99.003	41,42
4	Kabupaten Tanah Datar	372.910	194.620	52,19
5	Kabupaten Padang Pariaman	431.224	200.189	46,42
6	Kabupaten Agam	530.536	227.265	42,84
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	382.932	161.966	42,30
8	Kabupaten Pasaman	311.442	123.259	39,58
9	Kabupaten Kep. Mentawai	88.845	44.102	49,64
10	Kabupaten Dharmasraya	215.341	76.298	35,43
11	Kabupaten Solok Selatan	182.117	68.965	37,87
12	Kabupaten Pasaman Barat	433.761	196.324	45,26
13	Kota Padang	908.557	370.601	40,79
14	Kota Solok	74.271	43.722	58,87
15	Kota Sawahlunto	66.853	37.471	56,05
16	Kota Padang Panjang	58.140	49.765	85,60
17	Kota Bukittinggi	123.296	78.686	63,82
18	Kota Payakumbuh	139.119	63.992	46,00
19	Kota Pariaman	93.774	46.453	49,54
	Sumatera Barat	5.551.758	2.496.112	44,96

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Capaian tertinggi berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar 97,82 persen, sedangkan capaian terendah berada di Kota Padang, dengan capaian kepemilikan hanya 79,96 persen. Bagi Kabupaten/Kota dengan capaian yang masih jauh dibawah target, akan terus meningkatkan inovasi salah satunya melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah dan rumah sakit dengan harapan target kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dapat tercapai.

Tabel 58.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Anak 0-18 Tahun (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kelahiran (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	175.258	171.440	97,82
2	Kabupaten Solok	132.767	119.191	89,77
3	Kabupaten Sijunjung	82.001	74.468	90,81
4	Kabupaten Tanah Datar	111.005	103.924	93,62
5	Kabupaten Padang Pariaman	144.557	125.966	87,14
6	Kabupaten Agam	164.311	144.562	87,98
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	121.409	109.366	90,08
8	Kabupaten Pasaman	110.294	91.254	82,74
9	Kabupaten Kep. Mentawai	33.141	28.881	87,15
10	Kabupaten Dharmasraya	71.274	60.025	84,22
11	Kabupaten Solok Selatan	62.368	50.596	81,12
12	Kabupaten Pasaman Barat	160.901	152.463	94,76
13	Kota Padang	287.709	230.066	79,96
14	Kota Solok	26.264	25.545	97,26
15	Kota Sawahlunto	21.659	21.072	97,29
16	Kota Padang Panjang	20.087	19.491	97,03
17	Kota Bukittinggi	40.695	38.007	93,39
18	Kota Payakumbuh	47.109	44.324	94,09
19	Kota Pariaman	30.696	27.019	88,02
	Sumatera Barat	1.843.505	1.637.660	88,83

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

2) Kepemilikan Akta Perkawinan

Persentase kepemilikan akta perkawinan berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akta perkawinan per 31 Desember 2019 yang dapat dilihat pada Tabel 59, dimana terlihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan Provinsi Sumatera Barat ini juga sangat kecil yaitu hanya sebesar 38,85 persen.

Namun, capaian ini mengalami progres kenaikan cukup signifikan sebesar 12,50 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang hanya sebesar 26,35 persen dari jumlah penduduk dengan status kawin.

Tabel 59.
Kepemilikan Akta Perkawinan Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Kawin (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perkawinan (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	232.944	48.834	20,96
2	Kabupaten Solok	174.699	94.747	54,23
3	Kabupaten Sijunjung	112.917	73.571	65,15
4	Kabupaten Tanah Datar	170.833	89.405	52,33
5	Kabupaten Padang Pariaman	179.249	80.545	44,93
6	Kabupaten Agam	225.055	73.481	32,65
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	185.127	36.040	19,47
8	Kabupaten Pasaman	132.090	45.836	34,70
9	Kabupaten Kep. Mentawai	39.017	17.578	45,05
10	Kabupaten Dharmasraya	109.287	37.577	34,38
11	Kabupaten Solok Selatan	82.990	22.188	26,74
12	Kabupaten Pasaman Barat	184.683	69.110	37,42
13	Kota Padang	415.837	144.591	34,77
14	Kota Solok	32.768	26.237	80,07
15	Kota Sawahlunto	30.321	25.773	85,00
16	Kota Padang Panjang	24.866	21.438	86,21
17	Kota Bukittinggi	54.820	14.261	26,01
18	Kota Payakumbuh	63.165	27.632	43,75
19	Kota Pariaman	37.754	17.980	47,62
	Sumatera Barat	2.488.422	966.824	38,85

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Capaian yang masih sangat kecil ini disebabkan karena data kepemilikan akta perkawinan ini hanya diperoleh dari database penduduk yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang sifatnya adalah berdasarkan laporan dari penduduk yang melakukan perkawinan, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengeluarkan Akta Perkawinan untuk perkawinan non muslim, maka data kepemilikan akta perkawinan muslim hanya bisa didapat apabila penduduk yang bersangkutan melaporkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari Tabel 59 juga dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta perkawinan terbesar berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 86,21 persen dan terkecil berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu hanya sebesar 19,47 persen.

3) *Kepemilikan Akta Perceraian*

Persentase kepemilikan akta perceraian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akta perceraian per 31 Desember 2019 yang dapat dilihat pada Tabel 60.

Dari Tabel 60 tersebut dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan akta perceraian di Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar 26,98 persen. Capaian ini mengalami progres kenaikan sebesar 6,97 persen bila dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 20,01 persen dari jumlah perceraian hidup yang ada.

Namun angka capaian kepemilikan akta perceraian ini juga masih sangat kecil. Sama halnya dengan kepemilikan akta

perkawinan, untuk kepemilikan akta perceraian ini, data juga diperoleh dari penduduk yang melaporkan perceraian. Bila penduduk yang telah bercerai tidak melaporkan perceraian, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan memiliki data terhadap perceraian tersebut, khususnya untuk perceraian penduduk muslim yang dilakukan di Pengadilan Agama, karena Dinas Dukcapil hanya mengeluarkan Akta Perceraian untuk penduduk non muslim.

Tabel 60.
Kepemilikan Akta Perceraian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup (Jiwa)	Kepemilikan Akta Perceraian (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	7.148	247	3,46
2	Kabupaten Solok	3.528	1.522	43,14
3	Kabupaten Sijunjung	2.286	323	14,13
4	Kabupaten Tanah Datar	5.482	2.033	37,09
5	Kabupaten Padang Pariaman	6.488	998	15,38
6	Kabupaten Agam	8.106	3.099	38,23
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	4.032	865	21,45
8	Kabupaten Pasaman	3.289	378	11,49
9	Kabupaten Kep. Mentawai	477	40	8,39
10	Kabupaten Dharmasraya	1.800	329	18,28
11	Kabupaten Solok Selatan	2.064	418	20,25
12	Kabupaten Pasaman Barat	4.485	966	21,54
13	Kota Padang	11.993	4.710	39,27
14	Kota Solok	1.147	749	65,30
15	Kota Sawahlunto	1.098	531	48,36
16	Kota Padang Panjang	1.031	260	25,22
17	Kota Bukittinggi	1.884	517	27,44
18	Kota Payakumbuh	2.212	514	23,24
19	Kota Pariaman	1.484	393	26,48
	Sumatera Barat	70.034	18.892	26,98

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2019 (diolah)

Untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa perceraian yang terjadi sehingga

bisa dilakukan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masing-masing Kabupaten/Kota.

4) Kepemilikan Akta Kematian

Persentase kepemilikan akta kematian berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kematian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 61 berikut ini :

Tabel 61.
Kepemilikan Akta Kematian Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2019

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Meninggal (Jiwa)	Kepemilikan Akta Kematian (Jiwa)	%
1	Kabupaten Pesisir Selatan	8.143	6.113	75,07
2	Kabupaten Solok	6.576	4.798	72,96
3	Kabupaten Sijunjung	1.060	91	8,58
4	Kabupaten Tanah Datar	9.567	9.268	96,87
5	Kabupaten Padang Pariaman	2.606	2.606	100,00
6	Kabupaten Agam	6.526	6.526	100,00
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	167	167	100,00
8	Kabupaten Pasaman	1.212	1.212	100,00
9	Kabupaten Kep. Mentawai	21	9	42,86
10	Kabupaten Dharmasraya	602	602	100,00
11	Kabupaten Solok Selatan	270	94	34,81
12	Kabupaten Pasaman Barat	2.210	2.210	100,00
13	Kota Padang	1.925	744	38,65
14	Kota Solok	328	328	100,00
15	Kota Sawahlunto	417	417	100,00
16	Kota Padang Panjang	456	456	100,00
17	Kota Bukittinggi	427	427	100,00
18	Kota Payakumbuh	1.311	925	70,56
19	Kota Pariaman	2.564	2.066	80,58
	Sumatera Barat	46.388	39.059	84,20
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota (diolah)				

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kematian tersebut adalah sebesar 84,20 persen dari jumlah penduduk mati (meninggal) pada tahun 2019. Dari 19

(sembilan belas) Kabupaten/Kota, 10 (sepuluh) diantaranya memiliki persentase kepemilikan akta kematian sebesar 100 persen, sedangkan persentase kepemilikan terendah berada di Kabupaten Sijunjung yaitu hanya sebesar 8,58 persen.

Untuk data kepemilikan akta kematian ini, sama halnya dengan kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian hanya berasal dari penduduk yang melaporkan peristiwa (kejadian) kematian saja, sehingga terlihat bahwa kesadaran penduduk untuk melaporkan dan membuat akta kematian masih sangat kurang sekali. Mereka hanya melaporkan peristiwa kematian disaat perlu untuk membuat akta kematian saja seperti untuk mengurus pensiun.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Provinsi Sumatera Barat, termasuk kesenjangan pembangunan. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 yang telah diolah, data perkembangan kependudukan dari Kabupaten/Kota khususnya untuk data yang terkait migrasi penduduk (pindah dan datang) dan data terkait kematian dan kepemilikan akta kematian, serta data pendukung dari lintas sektor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat ini akan disajikan secara berkala. Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan

dan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian yang dapat kami susun dan sajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumatera Barat. Diambil dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera-Barat>.
2. Potensi Ekonomi Sumatera Barat. Diambil dari : www.sumbarprov.go.id/details/news/305.
3. Sektor Pertambangan. Diambil dari : www.sumbarprov.go.id/details/news/2700.
4. Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Diambil dari : <https://www.ilmupengetahuanumum.com/kabupaten-dan-kota-di-provinsi-sumatera-barat/>
5. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat Periode Februari 2020. Diambil dari : <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sumbar/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Februari-2020.aspx>
6. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sumatera Barat pada Desember 2019 mencapai 5.180 orang. Diambil dari : <https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2020/02/03/776/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara--wisman--yang-datang-ke-sumatera-barat-pada-desember-2019-mencapai-5-180-orang.html>